

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**



Oleh :

ARDIANSYAH PUTRA

NIM	: 20919030
Program Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Audit Forensik

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh :

ARDIANSYAH PUTRA

NIM : 20919030
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Audit Forensik

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, Agustus 2025



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ardiansyah Putra".

Ardiansyah Putra

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, Agustus 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ARDIANSYAH PUTRA

No. Mhs. : 20919030

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister. Meskipun masih jauh dari sempurna, penulis tetap bersyukur dan bangga atas pencapaian ini.

Tesis ini saya persembahkan untuk Alm. Ayahanda dan adik-adik tercinta, serta teristimewa untuk Ibunda tersayang, yang dengan keteguhan hati, kesabaran tanpa batas, dan kasih sayang yang tak pernah surut, terus berjuang membesarkan, membimbing, dan mendukung saya dalam setiap langkah.

Terima kasih atas cinta tulus yang tak ternilai, atas doa-doa yang tak pernah lelah terucap, dan atas pengorbanan yang tak akan mampu terbalas sepanjang hidup. Segala pencapaian ini adalah wujud dari perjuangan, cinta, dan doa yang kalian tanamkan sejak awal perjalanan saya. Hidup menjadi lebih ringan dan indah saat dikelilingi keluarga yang memahami dan mencintai saya dengan tulus, bahkan melebihi rasa yang mampu saya berikan kepada diri sendiri.

Terima kasih telah menjadi keluarga yang sempurna dan anugerah terindah dalam hidup saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahrabil'alamiinn, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju era yang penuh cahaya, serta menjadi teladan dalam menunaikan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Tesis ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, penelitian, dan refleksi yang panjang, yang dilalui dengan berbagai tantangan serta pengalaman berharga. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister sekaligus bentuk tanggung jawab akhir penulis sebagai mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan dan kemungkinan kesalahan, sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan tulus dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan semangat selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, Dengan

segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Universitas Islam Indonesia, dan juga selaku dosen pembimbing utama, terima kasih banyak atas bimbingan yang telah diberikan dan kebijaksanaannya berkenan dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., Ph.D. selaku dosen penguji, terima kasih banyak atas bimbingan, kritik dan sarannya untuk perbaikan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Jurusan Magister Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa studi.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Pemerintah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, serta para aparatur desa yang telah memberikan kesempatan dan data yang sangat berarti dalam penelitian ini.
8. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh rekan dan sahabat yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses penyusunan tesis ini.

9. Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak atas segala doa dan dukungannya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu akuntansi dan peningkatan tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan akuntabel.

Wassallamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Agustus 2025

Penulis,
Ardiansyah Putra

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.3.1 Lingkup Wilayah.....	9
1.3.2 Variabel Yang Diteliti	9
1.3.3 Aspek Pengukuran.....	10
1.3.4 Kerangka Waktu.....	10
1.3.5 Pendekatan dan Metode.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1 Manfaat Teoritis	11
1.5.2 Manfaat Praktis.....	11
1.6 Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 <i>Theory Stakeholders</i>	14
2.1.2 <i>Theory of Good Governance</i>	15
2.1.3 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	21
2.2 Kualitas Laporan Keuangan	24
2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia	27
2.3.1 Definisi <i>Human Capital Theory</i>	28
2.3.2 Konsep Utama dalam <i>Human Capital Theory</i>	29

2.4 Implementasi Akuntansi.....	30
2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	31
2.6 Sistem Pengendalian Internal	33
2.7 Hipotesis Penelitian.....	34
2.7.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	34
2.7.2 Pengaruh Implementasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	35
2.7.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	36
2.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	37
2.8 Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Populasi Dan Sampel	40
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
3.4.1 Variabel Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	45
3.4.2 Variabel Independen (X)	46
3.5 Metode Analisis.....	50
3.5.1 Alat Analisis Data	50
3.5.2 Model Pengukuran	51
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.2 Karakteristik Responden	54
4.3 Hasil Pengumpulan Data	55
4.4 Deskripsi Responden.....	55
4.4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
4.4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjabat.....	56
4.5 Deskripsi Hasil Kuesioner.....	57
4.5.1 Variabel Sumber Daya Manusia (X1)	57
4.5.2 Variabel Implementasi Akuntansi (X2)	62
4.5.3 Variabel Teknologi Informasi (X3).....	68
4.5.4 Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4).....	73

4.5.5 Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	79
4.6 Evaluasi Model Pengukuran.....	84
4.6.1 Uji Validitas	84
4.6.2 Uji Reliabilitas.....	88
4.7 Uji Asumsi Klasik	89
4.7.1 Uji Normalitas	90
4.7.2 Uji Multikolinearitas	91
4.7.3 Uji Heteroskedastisitas	92
4.8 Analisis Regresi Linier Berganda	93
4.9 Uji Hipotesis.....	96
4.9.1 Uji R	96
4.9.2 Uji F.....	97
4.9.3 Uji T	99
4.10 Pembahasan.....	101
4.10.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	101
4.10.2 Pengaruh Implementasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	102
4.10.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	103
4.10.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.....	103
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Implikasi Hasil Penelitian	106
5.3 Keterbatasan Penelitian	107
5.4 Saran Untuk penelitian Selanjutnya	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden penelitian adalah aparatur desa, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang lebih relevan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of human resource quality, accounting implementation, information technology utilization, and internal control systems on the quality of village government financial reports. The background of this study is based on the importance of financial reports as a form of accountability and transparency in the management of village funds, especially after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research was conducted in villages in Sultan Daulat Sub-district, Subulussalam City, Aceh Province. The method used was a quantitative approach with survey techniques, using questionnaires as data collection instruments. The research respondents were village officials, and the data were analyzed using multiple linear regression. The results showed that the four independent variables, namely the quality of human resources, accounting implementation, information technology utilization, and internal control systems, did not significantly affect the quality of village government financial reports. This finding indicates that these factors have not been able to make a meaningful contribution in improving the quality of village government financial reports, so further study of other more relevant factors is needed.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di tingkat lokal. Sebagai entitas yang berada di lapisan dasar pemerintahan, desa tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga menjadi cerminan nyata dari keragaman budaya, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia. Desa memiliki karakteristik unik yang mencerminkan identitas lokal, yang berkontribusi besar dalam menjaga keutuhan dan eksistensi negara secara keseluruhan (Hadi, 2020).

Pentingnya peran desa dalam sistem pemerintahan diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dengan memberikan otonomi yang lebih luas, termasuk kewenangan dalam mengelola pemerintahan, merancang program pembangunan, serta mengelola sumber daya lokal secara efektif dan efisien (Wardhana et al., 2023). Dengan adanya otonomi ini, desa diharapkan mampu menjadi pusat pembangunan berbasis masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Namun, meskipun penguatan kelembagaan dan pemberian otonomi tersebut membawa banyak manfaat, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah potensi ketergantungan desa terhadap dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan dan kebijakan, yang dapat menghambat kemandirian sejati. Selain itu, desa juga sering menghadapi kendala dalam

pelaksanaan fungsi administratif, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tantangan dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang kompleks di tingkat lokal (Heryanto, 2021).

Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab publik dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Laporan keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaporan, laporan keuangan pemerintah desa harus disusun sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan secara nasional (Yusriadi, 2021).

Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi pelaporan keuangan di tingkat desa terletak pada keterbatasan kapasitas administrasi dan tata kelola yang masih belum optimal. Keterbatasan ini mencakup rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip akuntansi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan, serta minimnya infrastruktur pendukung administrasi. Oleh karena itu, sering kali diperlukan pendekatan pelaporan yang disederhanakan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi substansi dan kualitas informasi yang disampaikan (Triyuwono, 2019).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, berbagai program pelatihan dan pendampingan teknis telah diinisiasi guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam mengelola serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini mencakup pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pemahaman standar akuntansi pemerintah, hingga

penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi (Nurhikmat et al., 2022). Selain pelatihan, upaya digitalisasi pelaporan keuangan, khususnya untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga telah diusulkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (Yuliani et al., 2021).

Meski berbagai inisiatif telah dilakukan, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam menyusun laporan, tetapi juga pada efektivitas proses manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi secara berkelanjutan. Sayangnya, implementasi proses-proses ini di banyak desa masih menghadapi kendala, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik (Yuliani et al., 2021).

Laporan keuangan pemerintah desa memegang peranan krusial dalam mencerminkan tingkat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan adanya regulasi ini, desa memiliki peran yang lebih signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan anggaran guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Namun, permasalahan yang kerap ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa. Kualitas laporan keuangan yang belum optimal ini berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pembangunan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Tidak adanya keterbukaan laporan keuangan pemerintah desa menimbulkan celah-celah penyalahgunaan anggaran oleh oknum aparat desa yang menyebabkan kerugian negara. Ketertutupan dalam pengelolaan keuangan desa membuka peluang bagi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat luas. Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dilansir pada <https://kbbaceh.news/kejari-kota-subulussalam-tahan-oknum-mantan-pj-kepala-desa-batu-napal/> di mana oknum mantan Pj Kepala Desa Batu Napal diduga melakukan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) serta kurang bayar insentif triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Akurat, 2023).

Secara keseluruhan, pelaporan keuangan desa memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa perlu terus dioptimalkan melalui berbagai strategi yang komprehensif. Strategi tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, penerapan teknologi digital dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, serta implementasi prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian intern yang lebih efektif juga harus diterapkan guna memastikan

bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, diharapkan kualitas laporan keuangan desa dapat semakin meningkat, sehingga mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menurut Tobamba et al (2023) kualitas **Sumber daya manusia (SDM)** adalah nilai dari perilaku seseorang dalam bertanggung jawab atas perbuatannya. Kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya perangkat desa, memainkan peran krusial dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal. SDM yang kompeten dan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntansi serta regulasi yang berlaku akan berkontribusi pada kualitas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Kualitas laporan keuangan desa sangat bergantung pada kompetensi SDM dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas tinggi dalam bidang keuangan akan mampu menyusun laporan yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas SDM dalam aspek teknis akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pelaporan dapat menyebabkan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), potensi kesalahan pencatatan, hingga risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Implementasi akuntansi adalah proses penerapan konsep, prinsip, standar, dan prosedur akuntansi dalam suatu organisasi atau entitas bisnis guna menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi ini mencakup pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Secara umum, implementasi akuntansi yang efektif membantu organisasi dalam mengevaluasi kinerja, memprediksi masa depan, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka (Dewi dan Puspitasari, 2023).

Selain itu, **pemanfaatan teknologi informasi** juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan alat yang berkaitan dengan pengolahan, manipulasi, dan perpindahan informasi antar media (Roza et al., 2023). Dengan adanya sistem berbasis digital, pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan minim kesalahan. Teknologi informasi memungkinkan integrasi data keuangan yang lebih sistematis, sehingga memudahkan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di bidang akuntansi, TIK membantu digitalisasi proses data untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan strategis (Halimah et al., 2024). Selain itu, penggunaan aplikasi atau perangkat lunak keuangan juga dapat membantu dalam monitoring anggaran, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih akurat dan mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan penerapan teknologi dalam laporan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin meningkat. Masyarakat pun dapat dengan lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran, sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memfasilitasi pencatatan transaksi elektronik dan

pelaporan real-time, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Susano dan Rachmawati, 2024). Sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi dapat mempermudah proses pelaporan, meminimalisir kesalahan administratif, serta memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan secara real-time. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Sistem Pengendalian Internal atau yang biasa kita dengar SPI itu adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Naufal, 2024).

SPI sangat penting bagi lembaga pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengelola informasi secara akurat, melindungi aset, dan memastikan efisiensi operasional (Pilat, 2016; Resti, 2020). Dalam konteks pemerintahan, SPI terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Welly, 2021). Penerapan SPI yang efektif dapat mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah secara signifikan (Welly, 2021). Namun, beberapa aspek implementasi SPI mungkin memerlukan perbaikan, seperti penyetoran dana yang diterima dengan segera dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pembayaran (Pilat, 2016).

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan dalam pengembangan kajian akuntansi, khususnya pada konteks pelaporan keuangan pemerintah desa. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yuliani dan Kartika (2020), yang hanya menyoroti pengaruh kualitas sumber daya manusia

terhadap kualitas laporan keuangan desa, atau penelitian oleh Soleman dan Latuconsina (2019), yang terbatas pada peran teknologi informasi, studi ini secara simultan mengkaji empat faktor utama, yaitu kualitas sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selain itu, lokasi penelitian di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, memberikan perspektif kontekstual yang jarang disentuh oleh studi sejenis, padahal wilayah ini menghadapi tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan desa serta pernah menjadi sorotan publik akibat kasus penyimpangan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur terkait pelaporan keuangan desa yang komprehensif dan memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**. Penelitian ini dilakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta menjadi referensi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia (SDM) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

2. Apakah implementasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Untuk memastikan penelitian tetap terarah dan tidak meluas, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1.3.1 Lingkup Wilayah

Penelitian ini hanya dilakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Sehingga hasil penelitian akan merepresentasikan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain.

1.3.2 Variabel Yang Diteliti

Penelitian ini hanya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa, yang terdiri dari empat variabel utama:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan prinsip akuntansi pemerintahan.
2. Implementasi Akuntansi, yaitu sejauh mana penerapan standar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan desa.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa.

4. Sistem Pengendalian Internal, yang mencakup mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa.

1.3.3 Aspek Pengukuran

Kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, relevansi, dan keandalan informasi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.3.4 Kerangka Waktu

Penelitian ini akan mengkaji data dalam periode rentang waktu lima tahun terakhir, agar relevan dengan perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru terkait keuangan desa.

1.3.5 Pendekatan dan Metode

Studi ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode penelitian kuantitatif, disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan, seperti wawancara, survei, atau penyebaran kuesioner kepada perangkat dan kepala desa, terkait kualitas laporan keuangan desa.

Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa serta rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

2. Mengetahui sejauh mana implementasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
3. Mengkaji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
4. Menganalisis peran sistem pengendalian internal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
2. Menambah wawasan akademik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Menguji secara empiris hubungan antara kualitas SDM, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

- a. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b. Menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi di desa agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- d. Membantu dalam penguatan sistem pengendalian internal guna meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

- a. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kebijakan pengelolaan keuangan desa.
- b. Menjadi masukan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait laporan keuangan.

3. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan profesional.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.
- b. Menjadi dasar dalam pengembangan model atau teori yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori, kajian pustaka, uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji, serta kerangka model penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, serta pengujian dan pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian yang dirasakan peneliti, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Stakeholders

Teori stakeholders merupakan salah satu pendekatan penting dalam ilmu manajemen dan akuntansi, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemilik modal, tetapi juga oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh R. Edward Freeman (1984), yang mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, teori ini memberikan perspektif bahwa organisasi perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Dalam konteks pemerintahan desa, stakeholders mencakup pemerintah desa itu sendiri, masyarakat sebagai penerima manfaat dana publik, lembaga pengawas, pemerintah daerah, serta otoritas regulasi. Teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan desa, karena laporan tersebut berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Desa sebagai entitas publik berkewajiban untuk mengelola dana desa secara efisien, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta memastikan informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Menurut Donaldson dan Preston (1995), teori *stakeholders* tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif, yang artinya mengandung tuntutan etis

bahwa organisasi memiliki kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak informasi dari para *stakeholders*. Dalam hal ini, laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap standar teknis, tetapi juga dari kemampuannya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang partisipatif dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, teori *stakeholders* menjadi landasan teoritis dalam memahami pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Keberadaan SDM yang kompeten, implementasi akuntansi yang sesuai, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan bentuk tanggung jawab internal pemerintah desa untuk memenuhi harapan para *stakeholders*. Kualitas laporan keuangan yang baik akan memperkuat legitimasi pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2.1.2 Theory of Good Governance

Setelah memahami bahwa teori *stakeholders* menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan organisasi publik, maka untuk memperkuat prinsip-prinsip tersebut dalam praktik tata kelola pemerintahan, penelitian ini juga merujuk pada *teori good governance* yang menjadi dasar pengembangan kebijakan governansi sektor publik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (2022), Pedoman ini menyajikan standar tata kelola sektor publik yang bertumpu pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pedoman dari KNKG ini sangat sejalan dengan *teori stakeholders* yang menjadi landasan penelitian ini, karena menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pemerintah desa, hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga moral dan sosial kepada masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak dari kebijakan keuangan desa.

Oleh karena itu, prinsip governansi publik KNKG dapat dijadikan kerangka evaluatif dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang menjadi fokus penelitian ini.

Theory of Good Governance pertama kali dikemukakan oleh *World Bank* dalam bukunya. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, baik di sektor publik maupun swasta, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut *United Nation Development Programme* (1997) *good governance* memiliki beberapa prinsip utama, yaitu :

a) Partisipasi

Merupakan keterlibatan aktif dan konstruktif dari masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam diskusi, serta kontribusi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima

keputusan, tetapi juga turut serta dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

b) Transparansi

Merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan, keputusan, serta proses yang sedang berlangsung. Dengan transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif, membangun kepercayaan terhadap institusi, serta mengawasi jalannya pemerintahan atau organisasi demi mencegah penyalahgunaan wewenang.

c) Akuntabilitas

Merujuk pada kewajiban pemegang kekuasaan untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memastikan bahwa kebijakan serta keputusan yang diambilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemegang kekuasaan, baik di pemerintahan maupun di organisasi lainnya, harus mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar dan dampak dari setiap keputusan yang dibuat, serta siap menerima konsekuensi jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan atau merugikan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, diharapkan tercipta sistem yang transparan, adil, dan dapat dipercaya.

d) Efektivitas dan efisiensi

Mengacu pada kemampuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang paling tepat dan terukur. Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya—baik waktu, tenaga, maupun biaya—secara maksimal tanpa pemborosan. Dengan

menggabungkan kedua prinsip ini, diharapkan setiap proses dapat berjalan dengan lancar, memberikan hasil yang maksimal, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana, sehingga tujuan akhir dapat tercapai dengan cara yang paling hemat dan produktif.

e) Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Penegakan hukum (*Rule of Law*) adalah prinsip yang menegaskan pentingnya supremasi hukum yang diterapkan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa hukum haruslah menjadi dasar utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, di mana setiap individu, tanpa kecuali, diperlakukan sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan atau kebijakan yang diambil didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa terlindungi, keadilan dapat tercapai, dan kepercayaan terhadap sistem hukum semakin kuat.

f) Responsivitas

Merujuk pada kemampuan pemerintah untuk merespons secara cepat, tepat, dan efektif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan segera mengambil tindakan atas masalah atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah yang responsif tidak hanya reaktif terhadap keluhan atau permintaan masyarakat, tetapi juga proaktif dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan dinamika dan perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, responsivitas menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi harapan publik.

g) Kesenjangan dan inklusivitas

Merujuk pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau perbedaan lainnya, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Ini mencakup pemberian akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, baik melalui pemilu, konsultasi publik, ataupun keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas politik dan sosial. Dengan menegakkan kesetaraan dan inklusivitas, diharapkan setiap suara dapat didengar, dan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman serta kebutuhan seluruh warga negara, tanpa ada yang terpinggirkan atau diabaikan.

h) Konsensus

Ini adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima bersama demi kepentingan bersama. Dalam pendekatan ini, setiap suara didengarkan, dan solusi yang diambil diusahakan untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi berbagai pihak. Proses konsensus menekankan pentingnya dialog, kompromi, dan kesediaan untuk bekerja sama guna mencapai keputusan yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan mengutamakan musyawarah, konsensus menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas atau masyarakat.

Prinsip-prinsip *good governance* memiliki peran yang krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks penelitian

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laporan keuangan pemerintah desa, prinsip *good governance* dapat menjadi landasan utama dalam menganalisis bagaimana berbagai aspek tata kelola yang baik berkontribusi terhadap akurasi, keandalan, serta kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan dan pelaporan keuangan, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jika masyarakat aktif memberikan masukan atau mengawasi laporan keuangan desa, maka kemungkinan terjadi penyimpangan dapat diminimalkan. Transparansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan desa sangat penting agar informasi keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Desa yang menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik serta mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan dana. Akuntabilitas memastikan bahwa laporan keuangan desa dibuat dengan standar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dapat berdampak pada buruknya kualitas laporan keuangan, misalnya keterlambatan penyajian atau ketidaksesuaian dengan standar akuntansi. Kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaporan keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan laporan tersebut. Pemerintah desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Desa dan standar akuntansi pemerintah, agar laporan keuangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam penyampaian informasi keuangan. Jika ada permintaan dari masyarakat untuk mengakses laporan keuangan atau ada temuan dalam audit keuangan, pemerintah desa harus segera memberikan tanggapan dan tindakan korektif jika diperlukan. Laporan keuangan desa harus disusun dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pengalokasian anggaran yang adil dan inklusif dapat tercermin dalam laporan keuangan, misalnya dengan adanya dana untuk program pemberdayaan masyarakat atau bantuan sosial. Dalam proses penyusunan laporan keuangan desa, musyawarah antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak menyepakati kebijakan anggaran yang telah diterapkan. Proses ini juga membantu dalam menghindari konflik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan desa.

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu kerangka konseptual yang berperan penting dalam menjelaskan hubungan kerja antara dua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Teori ini banyak diaplikasikan dalam disiplin ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, serta telah mengalami perluasan ke ranah sektor publik. Gagasan mengenai teori keagenan secara formal dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu bentuk hubungan kontraktual di mana pihak **prinsipal** (pemilik kepentingan atau sumber daya) menunjuk pihak lain sebagai **agen** (pengelola atau pelaksana) untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama

prinsipal. Dalam pelaksanaan tugas ini, agen diberikan wewenang untuk membuat keputusan tertentu yang dapat memengaruhi kepentingan pihak prinsipal.

Namun, hubungan keagenan tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah potensi terjadinya **konflik kepentingan** dan **asimetri informasi** antara prinsipal dan agen. Agen, dalam banyak kasus, memiliki akses dan pemahaman yang lebih luas terhadap informasi internal terkait operasional dan keuangan dibandingkan dengan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan pihak prinsipal untuk melakukan pengawasan secara langsung dan menyeluruh terhadap tindakan agen, yang pada akhirnya membuka peluang bagi agen untuk bertindak secara oportunistik atau menyimpang dari tujuan utama yang diharapkan oleh prinsipal.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, khususnya di tingkat pemerintah desa, teori keagenan sangat relevan untuk digunakan sebagai lensa analisis. Masyarakat sebagai pemilik sah dari sumber daya publik berperan sebagai **prinsipal**, sedangkan aparatur pemerintah desa yang ditugaskan untuk mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran desa bertindak sebagai **agen** (Mardiasmo, 2018). Pemerintah desa memikul tanggung jawab besar untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien, efektif, serta akuntabel, yang salah satunya diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa. Akan tetapi, masyarakat sebagai prinsipal umumnya tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan maupun pelaporan keuangan. Dengan demikian, masyarakat sangat bergantung pada informasi yang disajikan oleh agen, yakni aparat desa, melalui laporan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, laporan keuangan berperan sebagai instrumen kunci yang memungkinkan pihak prinsipal untuk menilai sejauh mana kinerja dan tanggung jawab agen telah dilaksanakan dengan baik. Kualitas informasi dalam laporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut dapat memberikan gambaran yang jujur, relevan, dan andal mengenai pengelolaan keuangan desa (Halim, 2008). Kualitas ini pada akhirnya dipengaruhi oleh berbagai variabel pendukung, seperti efektivitas sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia (SDM), tingkat pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Jika faktor-faktor tersebut dioptimalkan dalam pelaksanaannya, maka mereka akan berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau tindakan oportunistik dari agen. Selain itu, mekanisme tersebut juga akan memperkuat sistem akuntabilitas dalam hubungan keagenan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya *moral hazard* yaitu kondisi di mana agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena lemahnya pengawasan.

Secara keseluruhan, teori keagenan menyediakan fondasi teoretis yang kuat dalam menilai pentingnya keterbukaan informasi dan mekanisme pelaporan dalam organisasi publik. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip-prinsip teori keagenan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang baik. Ketika semua komponen pendukung berjalan secara sinergis dan optimal, maka kualitas laporan keuangan pemerintah desa akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah desa, serta menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu kondisi di mana laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi maupun pertanggungjawaban publik. Dalam konteks akuntansi, khususnya pada entitas pemerintah desa, kualitas laporan keuangan menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB, 2018), kualitas informasi dalam laporan keuangan ditentukan oleh dua karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi dan penyajian yang jujur (*faithful representation*). Relevansi berarti informasi harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatif yang dapat membantu pengguna dalam menilai peristiwa ekonomi masa lalu, kini, dan masa depan. Sementara itu, penyajian yang jujur mencakup penyajian informasi secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Selain dua karakteristik utama tersebut, terdapat pula karakteristik pendukung yang dapat meningkatkan kegunaan informasi, yaitu daya banding (*comparability*), keterpahaman (*understandability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), dan ketepatan waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut akan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas secara objektif dan menyeluruh.

Selaras dengan itu, Jonas dan Blanchet (2000) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana laporan tersebut mampu menyajikan informasi yang benar dan adil (*true and fair view*) mengenai kondisi ekonomi dan aktivitas suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik, mendukung pengawasan, serta

sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kualitas laporan keuangan pemerintah desa ditentukan oleh karakteristik kualitatif yang mencakup relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diharapkan. karakteristik kualitatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik. Relevansi mengacu pada sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mampu memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan, sedangkan keandalan menekankan pentingnya informasi yang bebas dari kesalahan material dan bias, sehingga dapat dipercaya sebagai representasi yang wajar dari kondisi keuangan sebenarnya. Sementara itu, keterbandingan memungkinkan pengguna laporan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dari waktu ke waktu maupun antar entitas serupa, dan keterpahaman memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh para pengguna, terutama masyarakat desa yang memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten menjadi hal yang sangat krusial dalam mewujudkan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berlaku, seperti relevansi, keandalan, dan dapat dipahami, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Yuliana, 2020). Kualitas laporan keuangan pemerintah desa merujuk pada sejauh mana informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa mampu memenuhi kriteria dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang ditetapkan dalam regulasi resmi, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik kualitatif ini meliputi relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Relevansi mengacu pada kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik di tingkat desa. Keandalan berkaitan dengan ketepatan penyajian data, yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya tanpa mengandung unsur manipulatif atau bias. Kemudahan pemahaman memungkinkan laporan tersebut dapat dimaknai secara benar oleh pengguna laporan, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi. Sementara itu, keterbandingan memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk menilai kinerja keuangan desa antarperiode atau antardesa secara lebih objektif.

Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah desa tidak hanya dilihat dari segi teknis penyusunan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga dari aspek fungsional, yaitu bagaimana laporan tersebut mampu mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks otonomi desa yang semakin diperluas melalui berbagai kebijakan desentralisasi fiskal, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam organisasi yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Tidak seperti sumber daya lainnya, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merancang, dan mengembangkan potensi organisasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang tepat menjadi faktor penentu dalam menciptakan organisasi yang efektif dan efisien.

Sedarmayanti (2017), menjelaskan bahwa sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai pelaksana kerja, tetapi juga sebagai penggerak utama yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta inovasi dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa manusia merupakan aset organisasi yang memiliki kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mangkunegara (2015), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam organisasi karena peran mereka tidak hanya sebatas menjalankan tugas, tetapi juga sebagai

penentu keberhasilan organisasi. Manusia memberikan kontribusi melalui kemampuan intelektual, emosional, dan fisiknya yang dapat diarahkan untuk mendukung strategi organisasi.

Hasibuan (2016), memperkuat pemahaman tersebut dengan mendefinisikan sumber daya manusia sebagai keseluruhan tenaga kerja yang tersedia dalam organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan diarahkan secara sistematis demi mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pulce (2005), Sumber daya manusia (SDM) mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang terkandung dalam diri seseorang yang dapat digunakan untuk tujuan produktif dalam organisasi. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Gary S. Becker, seorang ekonom pemenang Nobel, mengembangkan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang menekankan bahwa individu dalam suatu organisasi atau negara merupakan aset berharga yang dapat dikembangkan melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.

2.3.1 Definisi Human Capital Theory

Menurut Becker (2009), modal manusia adalah keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas yang diperoleh individu melalui pendidikan dan pengalaman, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menganggap SDM sebagai modal yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi yang tepat, seperti pendidikan formal, pelatihan kerja, serta perbaikan kesehatan.

2.3.2 Konsep Utama dalam *Human Capital Theory*

Becker mengidentifikasi beberapa elemen penting dalam teori modal manusia:

a. Investasi dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi.

b. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Pengalaman kerja dan pelatihan yang diberikan oleh organisasi meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

c. Kesehatan sebagai Modal Manusia

Kondisi kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi ketidakhadiran akibat penyakit.

d. Mobilitas Tenaga Kerja

SDM yang memiliki keterampilan tinggi lebih fleksibel dalam berpindah pekerjaan, yang mendukung efisiensi pasar tenaga kerja.

e. Implikasi Teori Modal Manusia dalam Pengelolaan SDM

Dalam konteks organisasi dan pemerintahan, teori ini memiliki beberapa implikasi:

- Pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing nasional.
- Perusahaan perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan guna meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Individu harus menyadari pentingnya investasi dalam keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan prospek karier dan pendapatan.

f. Kritik terhadap *Human Capital Theory*

Meskipun teori modal manusia memiliki banyak manfaat, beberapa kritik yang muncul antara lain:

- Tidak semua investasi dalam pendidikan menghasilkan peningkatan produktivitas secara langsung.
- Teori ini kurang mempertimbangkan faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi peluang kerja.
- Adanya kesenjangan dalam akses pendidikan dan pelatihan, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Teori modal manusia yang dikembangkan oleh Gary S. Becker menekankan bahwa SDM adalah aset yang dapat dikembangkan melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, penerapan teori ini dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan tenaga kerja, serta daya saing ekonomi suatu negara. Namun, perlu adanya kebijakan yang memastikan akses pendidikan dan pelatihan merata agar manfaat teori ini dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat.

2.4 Implementasi Akuntansi

Implementasi akuntansi adalah proses penerapan prinsip, prosedur, dan sistem akuntansi secara sistematis dalam kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi akuntansi dalam sektor pemerintahan, khususnya pada pemerintahan desa, menjadi elemen krusial dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, karena melalui penerapan sistem akuntansi yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, informasi keuangan

yang disajikan tidak hanya mampu mencerminkan kondisi riil dari penggunaan anggaran, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemangku kepentingan, sebagaimana diungkapkan oleh Khasanah dan Nurul (2020), bahwa kualitas informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana implementasi akuntansi dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Implementasi akuntansi merupakan proses penerapan standar, prinsip, dan sistem akuntansi ke dalam praktik pengelolaan keuangan secara nyata yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam konteks pemerintahan desa maupun daerah, implementasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis pencatatan, tetapi juga mencerminkan kemampuan aparat dalam memahami serta menjalankan sistem akuntansi pemerintahan secara konsisten dan terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh Yani, Fitri and Wardani (2021), bahwa Implementasi sistem akuntansi yang baik akan sangat menentukan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, karena menyangkut aspek kepatuhan terhadap standar serta efektivitas dalam penyampaian informasi bagi para pemangku kepentingan.

2.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi dalam akuntansi merujuk pada penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi untuk mengelola, memproses, dan menyebarkan informasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Teknologi Informasi merupakan komponen penting dalam mendukung proses administrasi dan pengelolaan data dalam organisasi, termasuk di sektor publik.

Menurut Laudon, Kenneth dan Laudon (2018), teknologi informasi mencakup seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, termasuk dalam pengelolaan data dan informasi secara digital. Dalam konteks organisasi pemerintah, teknologi informasi berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi publik, seperti pengumpulan pendapatan dan pelayanan publik, yang sangat bergantung pada pemrosesan informasi (Garicano et al., 2010).

Teknologi informasi (TI) telah menjadi faktor kunci dalam perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Manuel Castells, seorang sosiolog dan ekonom terkemuka, memperkenalkan konsep "*The Network Society*" (Masyarakat Jaringan) dalam bukunya *The Rise of the Network Society*, Castells menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi informasi mengubah cara pemerintah, bisnis, dan masyarakat beroperasi dalam era digital.

Menurut Castells (2011), teknologi informasi merupakan infrastruktur fundamental yang membentuk masyarakat jaringan (*network society*), yaitu suatu tatanan sosial di mana informasi menjadi komoditas utama dalam berbagai aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, serta ditandai oleh karakteristik digitalisasi dan globalisasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa batas geografis, otomatisasi yang menggantikan proses manual untuk meningkatkan efisiensi, desentralisasi pengambilan keputusan yang berbasis data real-time, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan; dalam konteks administrasi pemerintahan, teknologi informasi memainkan peran penting melalui penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan publik, e-participation yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, pengelolaan data secara aman dan efisien, serta efisiensi birokrasi melalui

sistem digital yang terintegrasi, meskipun penerapan teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kesenjangan akses digital di berbagai lapisan masyarakat, ancaman terhadap keamanan siber dan perlindungan data, keterbatasan kompetensi teknologi pada sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta resistensi terhadap perubahan yang bersifat struktural maupun kultural dalam birokrasi pemerintahan.

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan desa.

2.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi oleh manajemen dan seluruh personel dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional, di mana sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian guna meminimalkan risiko serta mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan atau kesalahan (*fraud dan error*), sehingga kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi dapat terjaga secara optimal.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013), Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai

pencapaian tujuan dalam kategori berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian oleh Arens, Alvin A, Elder, Randal J. and Beasley (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedur yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, serta untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses operasional maupun pelaporan keuangan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif, laporan keuangan dapat diandalkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ketiga pendapat tersebut menegaskan bahwa sistem pengendalian intern memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh, termasuk dalam konteks akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor krusial dalam pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik, karena kompetensi, integritas, dan kapabilitas aparatur desa sangat menentukan dalam proses pencatatan, pelaporan, serta penyajian laporan keuangan. SDM yang kompeten akan mampu mengoperasikan sistem akuntansi desa, memahami prinsip-prinsip pelaporan, dan menyusun laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan. Menurut Mulyadi (2016), kualitas SDM yang memadai akan memengaruhi kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Dalam konteks pemerintah desa, aparatur yang memahami prinsip akuntansi serta memiliki pelatihan yang cukup akan lebih mampu menerapkan sistem akuntansi secara efektif dan efisien.

Penelitian Rina Yuliani and Dewi Kartika (2020) menunjukkan bahwa kualitas SDM, terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dan keuangan publik, berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal ini karena SDM yang profesional mampu melakukan pencatatan keuangan dengan lebih akurat dan sesuai standar. Selain itu, Syamsuddin (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh SDM yang tidak kompeten akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas SDM menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.

Dengan adanya uraian tersebut di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

2.7.2 Pengaruh Implementasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Implementasi akuntansi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip, standar, dan prosedur akuntansi dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi akuntansi yang baik mencerminkan adanya pemahaman dan penerapan terhadap sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah desa mencakup empat aspek utama: relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila implementasi akuntansi dijalankan secara optimal, maka laporan keuangan akan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga mampu mencerminkan kondisi keuangan desa secara akurat dan transparan. Zai et al., (2024), menjalesakan bahwa Implementasi Akuntansi bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa, memastikan bahwa semua elemen laporan disajikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Implementasi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

2.7.3 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Teknologi informasi (TI) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya di lingkungan pemerintah desa. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan keuangan desa mencakup penggunaan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes), perangkat lunak akuntansi, serta jaringan komunikasi digital yang mempercepat proses input, pengolahan, dan pelaporan data keuangan.

Dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi, pemerintah desa dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, relevan, dan andal, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang baik. Teknologi juga meminimalkan kesalahan manusia (*human error*), mengurangi potensi manipulasi

data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Soleman & Latuconsina (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, karena teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keandalan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Dengan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

2.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan secara efektif di instansi pemerintah, termasuk di tingkat pemerintahan desa, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena SPI yang baik akan memastikan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan dengan transparansi, akurasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, atau manipulasi data keuangan yang dapat merugikan kepentingan publik; penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa implementasi SPI yang baik secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, sebagaimana ditemukan oleh Wahyuni dan Ramantha (2014), yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, serta Suaryana (2011), yang menegaskan bahwa pengendalian intern yang efektif berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor public.

Sementara penelitian Permana dan Suardana (2017), juga menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang kuat di lingkungan pemerintah desa dapat mencegah ketidaksesuaian dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan tersebut, memberikan keyakinan yang lebih tinggi kepada publik dan pihak yang berkepentingan bahwa laporan yang disajikan adalah benar, tepat waktu, dan dapat dipercaya, serta mendukung tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa, yang meliputi sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

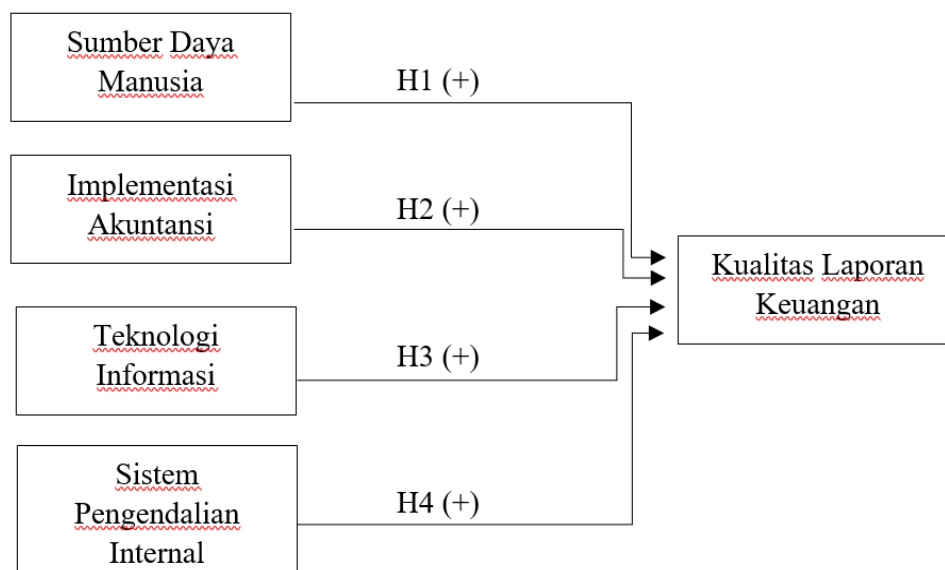
Implementasi akuntansi, khususnya penerapan sistem dan prinsip akuntansi berbasis standar akuntansi pemerintah, juga menjadi faktor krusial dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. Penerapan prinsip akuntansi secara

konsisten memungkinkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan berjalan secara tertib dan sistematis.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Teknologi informasi juga membantu mengurangi tingkat kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan keuangan.

Selain itu, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keandalan laporan keuangan dengan meminimalkan risiko kecurangan, kesalahan, dan ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian intern yang kuat dan berjalan dengan efektif akan memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan informasi keuangan yang disajikan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengukuran objektif, analisis statistik, dan generalisasi dari hasil penelitian ke populasi yang lebih luas (Gaito, 1974). Penelitian dengan metode kuantitatif menekankan pada pendekatan yang sistematis, terencana, dan terstruktur mulai dari desain hingga eksekusi (Syahroni, 2022). Prosesnya melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi masalah, tinjauan literatur, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan (Syahroni, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini antara lain sistem pengendalian internal, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan implementasi akuntansi sebagai variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan (Margono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan desa, seperti sekretaris desa, bendahara, dan staf keuangan.

Pemilihan Kecamatan Sultan Daulat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kontekstual, yaitu wilayah ini merepresentasikan karakteristik desa yang menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan, sekaligus menjadi lokasi yang pernah menjadi sorotan dalam pemberitaan terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, populasi ini dianggap tepat untuk dijadikan objek dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemerintah desa. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan desa, seperti sekretaris desa, bendahara, dan staf keuangan. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah ***purposive sampling***, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa (seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, atau staf yang menangani keuangan).

2. Telah menjabat atau bekerja di desa tersebut selama minimal satu tahun, guna memastikan bahwa responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem pelaporan keuangan dan kebijakan pengelolaan dana desa.
3. Bersedia menjadi responden dan mampu memberikan informasi secara objektif, berdasarkan pengalaman serta tanggung jawab yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan desa.

Jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan jumlah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sultan Daulat dan jumlah aparatur keuangan per desa yang memenuhi kriteria. Jika jumlah desa relatif sedikit, maka pendekatan **sensus** akan digunakan, yaitu dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan pendekatan purposive sampling, diharapkan data yang diperoleh dari responden mampu merepresentasikan kondisi yang sebenarnya serta mendukung keakuratan analisis terhadap pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat menentukan validitas dan keakuratan hasil analisis yang dilakukan. Menurut Ghazali (2018), data dalam penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan riset atau penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh harus mampu menggambarkan kondisi aktual objek penelitian

dan relevan dengan tujuan serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang dirancang secara sistematis guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **data primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan responden yang menjadi objek penelitian. Data primer dianggap paling relevan dalam menggali persepsi, pengetahuan, dan pengalaman langsung para aparatur pemerintah desa terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah **penyebaran kuesioner**. Kuesioner merupakan instrumen berupa seperangkat pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Instrumen ini disusun dalam bentuk tertutup dengan skala pengukuran menggunakan **skala Likert lima poin**, yang memungkinkan responden memberikan penilaian terhadap suatu pernyataan mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju". Skala ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kuantitatif atas sikap dan pendapat responden secara lebih sistematis.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai data demografis dan identitas responden seperti jenis kelamin, lama menjabat di desa dan tingkat pendidikan terakhir. Bagian kedua memuat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan masing-masing variabel penelitian, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM), implementasi akuntansi,

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, serta kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebagai variabel terikat.

Sebelum kuesioner disebarluaskan secara luas, dilakukan tahap **uji coba instrumen** (pre-test) kepada sejumlah responden dalam skala kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen, serta memastikan bahwa setiap butir pernyataan dapat dipahami secara jelas oleh responden. Hasil uji validitas dan reliabilitas ini digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan menyempurnakan instrumen sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama.

Distribusi kuesioner dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan mendatangi masing-masing desa yang menjadi lokasi penelitian, atau secara daring (online) menggunakan platform digital, apabila kondisi geografis atau situasi tertentu (seperti kendala waktu atau jarak) tidak memungkinkan pelaksanaan survei secara langsung. Dalam proses distribusi, peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian dan petunjuk pengisian kuesioner, guna memastikan bahwa responden memahami isi pertanyaan dengan benar dan menjawab secara jujur sesuai dengan kondisi yang mereka alami.

Seluruh data yang terkumpul dari kuesioner akan direkapitulasi dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk dianalisis secara kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terstruktur, sistematis, dan valid, diharapkan informasi yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan rujukan ilmiah maupun kebijakan praktis di bidang tata kelola keuangan desa.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran dari suatu konsep atau variabel abstrak ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris. Dalam konteks penelitian kuantitatif, definisi operasional diperlukan agar setiap variabel yang diteliti dapat diukur dengan instrumen yang valid, sehingga menghasilkan data yang objektif dan dapat dianalisis secara statistik (Sekaran dan Bougie, 2016). Definisi ini sekaligus menjadi acuan dalam merancang indikator-indikator pertanyaan dalam kuesioner.

Setiap variabel dalam penelitian ini akan dioperasionalkan berdasarkan teori-teori yang relevan serta dikembangkan dalam bentuk indikator terukur dengan menggunakan skala Likert lima poin, yaitu dari nilai 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Skala Likert dipilih karena dianggap efektif dalam mengukur sikap, persepsi, dan keyakinan responden terhadap suatu konstruk (Joshi et al., 2015).

3.4.1 Variabel Dependen (Y) : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Variabel ini diukur berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010), yaitu relevansi, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Indikator-indikator untuk variabel ini disusun mengacu pada pedoman pelaporan keuangan sektor publik serta penelitian sebelumnya (Jonas dan Blanchet, 2000). Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah desa disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Item Pernyataan Kualitas laporan keuangan pemerintah desa

NO	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
1	Relevansi	Laporan keuangan desa memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pembangunan desa.	SAP (PP No. 71 Tahun 2010); IASB (2018)
2	Keandalan (Faithful Representation)	Informasi dalam laporan keuangan desa disajikan secara jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material.	IASB (2018); Jonas & Blanchet (2000)
3	Dapat Dipahami (Understandability)	Laporan keuangan desa disusun dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.	SAP (PP No. 71 Tahun 2010); Jonas & Blanchet (2000)
4	Dapat Dibandingkan (Comparability)	Laporan keuangan desa dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten.	SAP (PP No. 71 Tahun 2010); IASB (2018)
5	Ketepatan Waktu (Timeliness)	Laporan keuangan desa disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.	Jonas & Blanchet (2000); Yuliana (2020)

3.4.2 Variabel Independen (X)

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

Diukur berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pemahaman terhadap prinsip akuntansi, dan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan. Variabel ini mengacu pada konsep human capital (Becker, 2009) dan indikator yang umum digunakan dalam pengukuran kompetensi aparatur desa (Pulce, 2005). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Item Pernyataan Kualitas Sumber Daya Manusia

NO	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
1	Tingkat Pendidikan	Saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa.	Pulce (2005); Becker (2009)
2	Pengalaman Kerja	Saya telah bekerja lebih dari satu tahun dalam posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.	Sedarmayanti (2017);Hasibuan (2016)
3	Pemahaman Akuntansi Pemerintahan	Saya memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan.	Becker (2009); Mulyadi (2016)
4	Kemampuan Teknis Menyusun Laporan	Saya mampu menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Becker (2009); Mangkunegara (2015)
5	Kemandirian dan Tanggung Jawab	Saya mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.	Tobamba et al. (2023); Sedarmayanti (2017)
6	Keterampilan dalam Menggunakan Teknologi	Saya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes.	Castells (2011); Dita et al. (2022)

2. Implementasi Akuntansi (X2)

Variabel ini mencerminkan sejauh mana aparat pemerintah desa mampu menerapkan prinsip dan prosedur akuntansi pemerintahan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator yang digunakan mencakup kelengkapan bukti transaksi, ketepatan pencatatan, penyusunan laporan yang sesuai standar, serta ketertiban administrasi keuangan. Penjabaran indikator ini mengacu pada penelitian oleh Sinurat et al., (2023) yang menyatakan bahwa implementasi SAP sangat ditentukan oleh pemahaman dan konsistensi dalam menjalankan prosedur akuntansi pemerintahan. Implementasi

Akuntansi informasi dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Item Pernyataan Implementasi Akuntansi

NO	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Saya menyusun laporan keuangan desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Sinurat et al. (2023)
2	Kelengkapan Bukti Transaksi	Setiap transaksi keuangan desa saya lengkapi dengan bukti pendukung yang sah.	Khasanah (2020); Yani & Wardani (2021)
3	Ketepatan Pencatatan Transaksi	Saya mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.	Yani & Wardani (2021)
4	Ketertiban Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan.	Khasanah (2020)
5	Penyusunan Laporan Keuangan yang Sistematis	Laporan keuangan disusun secara sistematis mulai dari jurnal, buku besar, hingga laporan akhir.	Khasanah (2020); SAP (PP No. 71 Tahun 2010)
6	Konsistensi dalam Penerapan Prosedur Akuntansi	Prosedur akuntansi keuangan desa diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.	Sinurat et al. (2023)

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa diukur dari aspek penggunaan sistem informasi keuangan desa, ketersediaan perangkat, pelatihan TI, dan integrasi data, dengan penilaian yang merujuk pada konsep masyarakat digital oleh Castells (2011) serta pemanfaatan aplikasi keuangan seperti Siskeudes (Susano dan Rachmawati, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial sebesar 58,9% terhadap pengelolaan alokasi dana desa, menunjukkan bahwa penggunaan TI memiliki kontribusi signifikan dalam

meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Dita et al., 2022). Kualitas Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Item Pernyataan Teknologi Informasi

NO	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
1	Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Saya menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa.	Susano & Rachmawati (2024); Castells (2011)
2	Ketersediaan Perangkat Teknologi	Desa kami memiliki perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mengelola keuangan.	Roza et al. (2023); Dita et al. (2022)
3	Pelatihan Teknologi Informasi	Saya pernah mengikuti pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan.	Castells (2011); Halimah et al. (2024)
4	Kemudahan Akses dan Integrasi Data	Sistem keuangan desa kami memudahkan integrasi dan akses data keuangan secara real-time.	Dita et al. (2022); Garicano & Heaton (2010)
5	Efisiensi Proses Pelaporan	Teknologi informasi membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan.	Halimah et al. (2024); Laudon & Laudon (2018)
6	Keamanan dan Keandalan Sistem TI	Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa cukup aman dan andal.	Castells (2011); Manuel Castells (The Network Society)

4. Sistem Pengendalian Internal (X4)

Mencakup lima komponen utama menurut (COSO, 2013): lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Indikator-indikatornya mengacu pada efektivitas prosedur pengawasan internal dalam mencegah kesalahan dan kecurangan (Arens et al., 2014). Sisten Pengendalian Internal dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Item Sistem Pengendalian Internal

NO	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
1	Lingkungan Pengendalian	Pemerintah desa memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.	COSO (2013); Arens et al. (2014)
2	Penilaian Risiko	Saya melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.	COSO (2013); Mardiasmo (2009)
3	Aktivitas Pengendalian	Tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dibagi secara jelas dan terdokumentasi.	COSO (2013); Wahyuni & Ramantha (2014)
4	Informasi dan Komunikasi	Informasi keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait dan mudah dipahami.	COSO (2013); Permana & Suardana (2017)
5	Pemantauan dan Evaluasi	Pengawasan atas pelaksanaan keuangan desa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.	COSO (2013); Suaryana (2011)
6	Tindakan Korektif	Pemerintah desa segera mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam laporan keuangan.	Arens et al. (2014); Mardiasmo (2009)

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Alat Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan desa di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Instrumen kuesioner disusun untuk mengukur lima variabel, yaitu kualitas sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Metode analisis statistik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

3.5.2 Model Pengukuran

3.5.2.1 Uji Validitas

Tujuan pengujian validitas untuk mengetahui seberapa dekat dan akurat proses penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya ada (Sreejesh et al., 2014). Terdapat lima variabel yang akan diuji di penelitian ini yaitu sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Uji ini dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa item-item dalam suatu konstruk memiliki konsistensi internal yang baik (Saunders et al., 2019).

3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi linier berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

- **Uji Normalitas:** menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau grafik P-P Plot untuk memastikan data terdistribusi normal.
- **Uji Multikolinearitas:** menggunakan nilai **Tolerance** dan **Variance Inflation Factor (VIF)**. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,1$.

- **Uji Heteroskedastisitas:** dilakukan dengan metode **Glejser Test** atau melihat sebaran plot antara residual dan nilai prediksi. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau jika tidak terdapat pola tertentu dalam scatterplot.

3.5.2.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah desa)
- X1 : Kualitas sumber daya manusia
- X2 : Implementasi akuntansi
- X3 : Pemanfaatan teknologi informasi
- X4 : Sistem pengendalian internal
- b0 : Konstanta (nilai Y saat seluruh X = 0)
- b1 – b4 : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e : Error/residual (kesalahan prediksi)

3.5.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti kemampuan prediksi model semakin baik (Hair et al., 2019).

3.5.2.6 Uji F

Pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y secara simultan (uji F):

1. $H_0 : \rho = 0$, artinya X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y .
2. $H_a ; \rho \neq 0$, artinya X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y .

Kaidah pengambilan keputusan:

Jika Sig F hitung $< \text{Sig } 0,05$ maka H_0 tidak didukung. Jika Sig F hitung $> \text{Sig } 0,05$ maka H_0 didukung.

3.5.2.7 Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi (p-value) digunakan untuk menilai hipotesis. Jika nilai $p \leq 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berfokus pada analisis data dan temuan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan teori yang dikembangkan pada bagian sebelumnya, penulis menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan berbagai masalah pokok dan hipotesis yang disajikan pada bab kedua, untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Wilayah ini dipilih karena menghadapi tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan desa dan pernah menjadi sorotan publik akibat kasus penyimpangan anggaran. Secara administratif, Kecamatan Sultan Daulat terdiri dari 19 desa dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam.

Sebagian besar desa di wilayah ini mengandalkan dana desa sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi, implementasi akuntansi dan lemahnya sistem pengendalian internal masih menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4.2 Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan staf keuangan. Total kuesioner yang disebarakan adalah 76 eksemplar dan 76 berhasil dikembalikan (response rate 100%).

4.3 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuisioner. Subjek responden penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Juga Staf bagian Keuangan Pada Pemerintah desa di Wilayah Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Dengan total sebanyak 76 responden yang mengisi kuesioner baik secara online maupun offline. Rincian informasi mengenai responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rincian Responden

Kuesioner	Online	Offline
Jumlah Responden	16	60
Total Responden	76	

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari sebahagian perangkat desa yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, baik melalui pengisian kuesioner *online* dan *offline*. Kuesioner penelitian online berupa google form sebanyak 16 kuesioner yang disebar melalui media social *whatsapp*. Kemudian sebanyak 60 kuesioner offline yang disebar dan diisi.

4.4 Deskripsi Responden

4.4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari dua kategori yaitu. laki-laki dan perempuan. Informasi berbasis gender responden penelitian ini disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki – Laki	70	92%
Perempuan	6	8%
TOTAL	76	100%

Sumber : Data diolah, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa 92% responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Sisanya sebesar 8% adalah perempuan.

4.4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh dari 76 responden pada penelitian ini, deskripsi berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	38	50%
S1	38	50%
DLL	0	0%
TOTAL	76	100%

Sumber : Data diolah, 2025

Data pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden seluruhnya memiliki tingkat pendidikan minimal SMA, dengan komposisi yang seimbang antara lulusan SMA 50% dan lulusan sarjana (S1) 50%. Tidak terdapat responden yang hanya berpendidikan SD, SMP maupun tingkat pendidikan lainnya.

4.4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Berdasarkan data yang diperoleh dari 76 responden pada penelitian ini, deskripsi responden berdasarkan lama menjabat dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjabat

Lama Menjabat	Frekuensi	Presentasi (%)
<1 Tahun	0	0%
>1 Tahun	23	30%
>2 Tahun	49	64%
>3 Tahun	4	5%
TOTAL	76	100%

Sumber : Data diolah, 2025

Data pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki masa jabatan lebih dari dua tahun (64%), diikuti 30% dengan masa jabatan lebih dari satu tahun, 5% lebih dari tiga tahun, dan tidak ada yang kurang dari satu tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama.

4.5 Deskripsi Hasil Kuesioner

4.5.1 Variabel Sumber Daya Manusia (X1)

1. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa (Pernyataan 1)

Tabel 4.5. Hasil Kuesioner Pernyataan 1

Saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa.				Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	24	31,6	31,6	32,9
	Setuju	36	47,4	47,4	80,3
	Sangat Setuju	15	19,7	19,7	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan table diatas, 76 responden yang memberikan jawaban terkait pernyataan “Saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa”, sebanyak 1 responden (1,3%) menyatakan tidak setuju yang berarti hanya sebagian kecil yang merasa latar belakang pendidikannya tidak

relevan, 24 responden (31,6%) bersikap netral yang menunjukkan mereka mungkin merasa latar belakang pendidikannya tidak sepenuhnya mendukung namun juga tidak sepenuhnya tidak relevan, 36 responden (47,4%) setuju bahwa pendidikan mereka relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa, dan 15 responden (19,7%) sangat setuju yang berarti mereka merasa latar belakang pendidikannya sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut, sehingga secara kumulatif 67,1% responden menyatakan setuju dan sangat setuju yang menunjukkan mayoritas memiliki keyakinan bahwa latar belakang pendidikannya mendukung pengelolaan keuangan desa, sedangkan hanya 1,3% yang tidak setuju, menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap relevansi pendidikan sangat rendah.

2. Saya telah bekerja lebih dari satu tahun dalam posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Pernyataan 2)

Tabel 4.6. Hasil Kuesioner Pernyataan 2

Saya telah bekerja lebih dari satu tahun dalam posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	5,3	5,3	5,3
	Netral	22	28,9	28,9	34,2
	Setuju	31	40,8	40,8	75,0
	Sangat Setuju	19	25,0	25,0	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Dari 76 responden yang memberikan jawaban terkait pernyataan “Saya telah bekerja lebih dari satu tahun dalam posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa”, sebanyak 4 responden (5,3%) tidak setuju yang menunjukkan sebagian kecil responden belum memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun di bidang tersebut, 22 responden (28,9%) bersikap netral yang mengindikasikan mereka mungkin memiliki pengalaman yang mendekati satu tahun atau belum

sepenuhnya relevan dengan pengelolaan keuangan desa, 31 responden (40,8%) setuju telah bekerja lebih dari satu tahun pada posisi terkait, dan 19 responden (25,0%) sangat setuju yang menegaskan bahwa mereka memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan relevan, sehingga jika digabungkan terdapat 65,8% responden yang setuju dan sangat setuju yang menunjukkan mayoritas memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun di bidang pengelolaan keuangan desa, sementara hanya 5,3% yang tidak setuju, menandakan bahwa responden dengan pengalaman kerja yang sangat minim relatif sedikit.

3. Saya memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan (Pernyataan 3)

Tabel 4.7. Hasil Kuesioner Pernyataan 3

Saya memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3,9	3,9	3,9
	Netral	17	22,4	22,4	26,3
	Setuju	38	50,0	50,0	76,3
	Sangat Setuju	18	23,7	23,7	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Dari 76 responden yang memberikan tanggapan terkait pernyataan “Saya memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan”, sebanyak 3 responden (3,9%) tidak setuju yang menandakan hanya sebagian kecil yang merasa belum memahami prinsip dan standar SAP, 17 responden (22,4%) bersikap netral yang menunjukkan mereka mungkin memiliki pemahaman dasar namun belum sepenuhnya yakin dengan kompetensinya, 38 responden (50,0%) setuju bahwa mereka memahami prinsip SAP dalam penyusunan laporan keuangan, dan 18 responden (23,7%) sangat setuju yang berarti mereka

memiliki keyakinan tinggi akan pemahaman SAP, sehingga jika digabungkan terdapat 73,7% responden yang setuju dan sangat setuju yang menunjukkan bahwa mayoritas memiliki pemahaman yang cukup baik terkait prinsip dan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan desa.

4. Saya mampu menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pernyataan 4)

Tabel 4.8. Hasil Kuesioner Pernyataan 4

Saya mampu menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	23	30,3	30,3	30,3
	Setuju	27	35,5	35,5	65,8
	Sangat Setuju	26	34,2	34,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Dari 76 responden yang memberikan tanggapan terkait pernyataan “Saya mampu menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebanyak 23 responden (30,3%) bersikap netral yang berarti mereka mungkin merasa cukup mampu tetapi belum sepenuhnya yakin akan kompetensinya, 27 responden (35,5%) setuju bahwa mereka mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku, dan 26 responden (34,2%) sangat setuju yang menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuan mereka, sehingga jika digabungkan terdapat 69,7% responden yang setuju dan sangat setuju yang menunjukkan bahwa mayoritas merasa mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai regulasi, sementara tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju, yang menandakan tingkat kepercayaan diri responden dalam hal ini cukup tinggi.

5. Saya mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab (Pernyataan 5)

Tabel 4.9. Hasil Kuesioner Pernyataan 5

Saya mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	24	31,6	31,6	31,6
	Setuju	26	34,2	34,2	65,8
	Sangat Setuju	26	34,2	34,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Dari 76 responden yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan “Saya mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab”, sebanyak 24 responden (31,6%) bersikap netral yang menunjukkan mereka merasa cukup mampu tetapi belum sepenuhnya yakin akan kemandirian dan tanggung jawabnya, 26 responden (34,2%) setuju bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab, dan 26 responden (34,2%) lainnya sangat setuju yang berarti mereka memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuannya dalam aspek ini, sehingga secara keseluruhan terdapat 68,4% responden yang setuju dan sangat setuju yang menunjukkan bahwa mayoritas merasa mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab tanpa ketergantungan pada pihak lain, serta tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju, yang menunjukkan tingkat keyakinan diri yang cukup tinggi.

6. Saya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes (Pernyataan 6)

4.10. Hasil Kuesioner Pernyataan 6

Saya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	13	17,1	17,1	18,4
	Setuju	31	40,8	40,8	59,2
	Sangat Setuju	31	40,8	40,8	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Dari 76 responden yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan “Saya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes”, sebanyak 1 responden (1,3%) tidak setuju yang berarti hanya sebagian kecil yang merasa belum mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan, 13 responden (17,1%) bersikap netral yang menandakan mereka mungkin memiliki kemampuan dasar namun belum sepenuhnya yakin terhadap penguasaan aplikasi tersebut, 31 responden (40,8%) setuju bahwa mereka mampu mengoperasikan aplikasi Siskeudes, dan 31 responden (40,8%) lainnya sangat setuju yang menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan teknis tersebut, sehingga jika digabungkan terdapat 81,6% responden yang setuju dan sangat setuju yang menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes.

4.5.2 Variabel Implementasi Akuntansi (X2)

1. Saya menyusun laporan keuangan desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Pernyataan 1)

Tabel 4.11. Hasil Kuesioner Pernyataan 1

Saya menyusun laporan keuangan desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	5,3	5,3	5,3
	Netral	14	18,4	18,4	23,7
	Setuju	37	48,7	48,7	72,4
	Sangat Setuju	21	27,6	27,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel di atas, diketahui bahwa dari total 76 responden, sebagian besar telah menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini terlihat dari 37 responden (48,7%) yang menyatakan setuju, serta 21 responden (27,6%) yang menyatakan sangat setuju. Jika digabungkan, maka terdapat 76,3% responden yang mendukung penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan desa. Sementara itu, terdapat 14 responden (18,4%) yang bersikap netral, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil aparatur desa belum sepenuhnya yakin atau mungkin masih dalam tahap adaptasi terhadap penerapan SAP. Adapun responden yang tidak setuju hanya berjumlah 4 orang (5,3%), yang mencerminkan persentase yang sangat kecil dibandingkan keseluruhan responden.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan desa telah berjalan cukup baik, dengan tingkat penerimaan dan pemahaman yang tinggi di kalangan aparatur desa. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi sebagian aparatur yang bersikap netral maupun tidak setuju agar pemahaman mereka semakin optimal.

2. Setiap transaksi keuangan desa saya lengkapi dengan bukti pendukung yang sah
(Pernyataan 2)

Tabel 4.12. Hasil Kuesioner Pernyataan 2

Setiap transaksi keuangan desa saya lengkapi dengan bukti pendukung yang sah		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	11	14,5	14,5	14,5
	Setuju	42	55,3	55,3	69,7
	Sangat Setuju	23	30,3	30,3	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, terlihat bahwa mayoritas aparatur desa telah melengkapi setiap transaksi keuangan desa dengan bukti pendukung yang sah. Hal ini tercermin dari 42 responden (55,3%) yang menyatakan setuju, dan 23 responden (30,3%) yang menyatakan sangat setuju. Jika digabungkan, maka terdapat 85,6% responden yang menyatakan penerapan prinsip akuntabilitas dengan melengkapi transaksi keuangan menggunakan bukti yang sah sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, sebanyak 11 responden (14,5%) bersikap netral, yang dapat mengindikasikan bahwa sebagian kecil aparatur desa mungkin belum sepenuhnya memahami atau konsisten dalam melaksanakan kewajiban administratif ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur desa dalam melengkapi transaksi keuangan dengan bukti pendukung yang sah cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, tetap diperlukan penguatan pemahaman dan pengawasan agar tidak ada celah ketidakpatuhan di masa mendatang.

3. Saya mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur
(Pernyataan 3)

Tabel 4.13. Hasil Kuesioner Pernyataan 3

Saya mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	14	18,4	18,4	18,4
	Setuju	39	51,3	51,3	69,7
	Sangat Setuju	23	30,3	30,3	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya telah mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Sebanyak 39 responden (51,3%) menyatakan setuju, dan 23 responden (30,3%) menyatakan sangat setuju. Jika digabungkan, maka terdapat 81,6% responden yang menyatakan telah melaksanakan pencatatan transaksi keuangan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, terdapat 14 responden (18,4%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan atau kendala teknis dalam pencatatan transaksi keuangan secara tepat waktu. Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kepatuhan aparaturnya terhadap prosedur pencatatan keuangan cukup tinggi, meskipun masih diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan seluruh aparaturnya mampu melaksanakan kewajiban ini secara optimal.

4. Administrasi keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan (Pernyataan 4)

Tabel 4.14. Hasil Kuesioner Pernyataan 4

Administrasi keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	15	19,7	19,7	19,7
	Setuju	37	48,7	48,7	68,4
	Sangat Setuju	24	31,6	31,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa mayoritas responden menilai administrasi keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan. Hal ini tercermin dari 37 responden (48,7%) yang menyatakan setuju, serta 24 responden (31,6%) yang menyatakan sangat setuju. Dengan demikian, 80,3% responden memberikan penilaian positif terhadap penerapan administrasi keuangan desa. Namun demikian, terdapat 15 responden (19,7%) yang bersikap netral, yang mengindikasikan masih ada sebagian aparatur desa yang belum sepenuhnya yakin atau mungkin belum merasakan konsistensi dalam penerapan ketertiban administrasi keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi keuangan desa umumnya telah berjalan sesuai aturan, meskipun tetap diperlukan upaya perbaikan dan penguatan kapasitas aparatur untuk meningkatkan konsistensi dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

5. Laporan keuangan disusun secara sistematis mulai dari jurnal, buku besar, hingga laporan akhir (Pernyataan 5)

Tabel 4.15. Hasil Kuesioner Pernyataan 5

Laporan keuangan disusun secara sistematis mulai dari jurnal, buku besar, hingga laporan akhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3,9	3,9	3,9
	Netral	23	30,3	30,3	34,2
	Setuju	31	40,8	40,8	75,0
	Sangat Setuju	19	25,0	25,0	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah menyusun laporan keuangan secara sistematis sesuai tahapan akuntansi. Sebanyak 31 responden (40,8%) menyatakan setuju, dan 19 responden (25,0%)

menyatakan sangat setuju, sehingga total 65,8% responden mendukung bahwa penyusunan laporan keuangan desa telah dilakukan secara berurutan mulai dari jurnal, buku besar, hingga laporan akhir. Namun, terdapat 23 responden (30,3%) yang bersikap netral, yang mungkin menunjukkan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya memahami atau konsisten dalam menerapkan sistematika penyusunan laporan keuangan. Selain itu, 3 responden (3,9%) menyatakan tidak setuju, yang berarti masih ada sebagian kecil yang menilai proses penyusunan laporan belum berjalan sesuai prosedur yang seharusnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat penerapan prosedur penyusunan laporan keuangan desa sudah cukup baik, meski masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman dan kepatuhan agar seluruh aparaturnya mampu menyusun laporan secara sistematis dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

6. Prosedur akuntansi keuangan desa diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun (Pernyataan 6)

Tabel 4.16. Hasil Kuesioner Pernyataan 6

Prosedur akuntansi keuangan desa diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	16	21,1	21,1	21,1
	Setuju	41	53,9	53,9	75,0
	Sangat Setuju	19	25,0	25,0	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparaturnya menilai bahwa prosedur akuntansi keuangan desa telah diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari 41 responden (53,9%) yang menyatakan setuju, serta 19 responden (25,0%) yang menyatakan sangat setuju, sehingga total 78,9% responden memberikan penilaian positif terhadap konsistensi penerapan

prosedur akuntansi keuangan desa. Namun, terdapat 16 responden (21,1%) yang bersikap netral, yang dapat mengindikasikan bahwa sebagian aparatur desa belum sepenuhnya yakin terhadap keberlanjutan konsistensi penerapan prosedur akuntansi dari tahun ke tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur akuntansi keuangan desa relatif stabil dan terjaga dari waktu ke waktu, meskipun tetap diperlukan monitoring dan evaluasi rutin agar konsistensi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

4.5.3 Variabel Teknologi Informasi (X3)

1. Saya menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa (Pernyataan 1)

Tabel 4.17. Hasil Kuesioner Pernyataan 1

Saya menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	7	9,2	9,2	9,2
	Setuju	32	42,1	42,1	51,3
	Sangat Setuju	37	48,7	48,7	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sebanyak 37 responden (48,7%) sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dan 32 responden (42,1%) menyatakan setuju. Sementara itu, hanya 7 responden (9,2%) yang bersikap netral, dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Siskeudes telah diterima dengan baik oleh aparatur desa dan telah menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Hal ini mencerminkan adanya pemahaman serta penerapan

teknologi informasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Desa kami memiliki perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mengelola keuangan (Pernyataan 2)

Tabel 4.18. Hasil Kuesioner Pernyataan 2

Desa kami memiliki perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mengelola keuangan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	13,2	13,2	13,2
	Setuju	33	43,4	43,4	56,6
	Sangat Setuju	33	43,4	43,4	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparaturnya menilai bahwa sarana prasarana teknologi, khususnya perangkat komputer atau laptop, sudah memadai untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Sebanyak 33 responden (43,4%) menyatakan setuju, dan 33 responden (43,4%) lainnya menyatakan sangat setuju, sehingga total 86,8% responden memberikan penilaian positif terkait ketersediaan perangkat teknologi. Sementara itu, 10 responden (13,2%) bersikap netral, yang dapat menunjukkan bahwa meskipun perangkat sudah tersedia, mungkin masih ada keterbatasan dalam hal kualitas, jumlah, atau pemanfaatannya secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa fasilitas teknologi informasi di desa pada umumnya sudah mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, namun tetap perlu dipastikan pemeliharaan dan pengembangan perangkat agar kinerjanya tetap optimal.

3. Saya pernah mengikuti pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan (Pernyataan 3)

Tabel 4.19. Hasil Kuesioner Pernyataan 3

Saya pernah mengikuti pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Tidak Setuju	2	2,6	2,6	3,9
	Netral	16	21,1	21,1	25,0
	Setuju	36	47,4	47,4	72,4
	Sangat Setuju	21	27,6	27,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sebanyak 36 responden (47,4%) menyatakan setuju, dan 21 responden (27,6%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 75,0% responden mengakui pernah mengikuti pelatihan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat 16 responden (21,1%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa mereka belum secara rutin mengikuti pelatihan atau hanya memiliki pengalaman terbatas. Selain itu, masih ada 3 responden (3,9%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil aparatur desa sama sekali belum mendapatkan pelatihan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman teknologi sudah cukup baik, namun masih perlu diperluas agar seluruh aparatur desa memiliki kompetensi yang merata dalam penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan.

4. Sistem keuangan desa kami memudahkan integrasi dan akses data keuangan secara real-time (Pernyataan 4)

Tabel 4.20. Hasil Kuesioner Pernyataan 4

Sistem keuangan desa kami memudahkan integrasi dan akses data keuangan secara real-time					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	7,9	7,9	7,9
	Setuju	43	56,6	56,6	64,5
	Sangat Setuju	27	35,5	35,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparat desa menilai bahwa sistem keuangan yang digunakan telah memudahkan integrasi dan akses data keuangan secara real-time. Sebanyak 43 responden (56,6%) menyatakan setuju, dan 27 responden (35,5%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 92,1% responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan akses dan integrasi data keuangan desa. Hanya 6 responden (7,9%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian kecil aparat desa belum sepenuhnya merasakan manfaat maksimal dari sistem keuangan berbasis teknologi ini, atau masih memerlukan peningkatan literasi digital. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem keuangan desa berbasis teknologi telah berjalan efektif, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal integrasi dan kemudahan akses informasi secara real-time.

5. Teknologi informasi membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan (Pernyataan 5)

Tabel 4.21. Hasil Kuesioner Pernyataan 5

Teknologi informasi membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	5,3	5,3	5,3
	Setuju	36	47,4	47,4	52,6
	Sangat Setuju	36	47,4	47,4	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki peran signifikan dalam mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan desa. Sebanyak 36 responden (47,4%) menyatakan setuju, dan 36 responden lainnya (47,4%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 94,8% responden memberikan penilaian positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan desa. Hanya 4 responden (5,3%) yang bersikap netral, yang dapat mengindikasikan bahwa sebagian kecil aparatur desa mungkin belum sepenuhnya merasakan kemudahan atau belum optimal dalam menggunakan teknologi informasi untuk pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi, kecepatan, dan kemudahan proses pelaporan keuangan desa, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

6. Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa cukup aman dan andal (Pernyataan 6)

Tabel 4.22. Hasil Kuesioner Pernyataan 6

Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa cukup aman dan andal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	10	13,2	13,2	13,2
	Setuju	36	47,4	47,4	60,5
	Sangat Setuju	30	39,5	39,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tanggapan responden, mayoritas aparaturnya menilai bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki tingkat keamanan dan keandalan yang baik. Sebanyak 36 responden (47,4%) menyatakan setuju, dan 30 responden (39,5%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 86,9% responden memberikan penilaian positif terhadap aspek keamanan dan keandalan sistem TI pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat 10 responden (13,2%) yang bersikap netral, yang dapat mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya memahami atau belum merasakan secara langsung jaminan keamanan dan keandalan sistem yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem TI yang diterapkan telah memberikan rasa aman dan keandalan yang cukup baik dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, meskipun tetap diperlukan peningkatan literasi keamanan digital dan evaluasi berkala agar kualitasnya tetap terjaga.

4.5.4 Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4)

1. Pemerintah desa memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan desa (Pernyataan 1)

Tabel 4.23. Hasil Kuesioner Pernyataan 1

Pemerintah desa memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	17	22,4	22,4	23,7
	Setuju	37	48,7	48,7	72,4
	Sangat Setuju	21	27,6	27,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparatur desa menilai pemerintah desa telah memiliki kebijakan tertulis terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Sebanyak 37 responden (48,7%) menyatakan setuju, dan 21 responden (27,6%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 76,3% responden memberikan penilaian positif. Namun demikian, terdapat 17 responden (22,4%) yang bersikap netral, yang mungkin menunjukkan bahwa sebagian aparatur desa belum sepenuhnya memahami atau mengetahui secara detail isi kebijakan tertulis tersebut. Selain itu, hanya 1 responden (1,3%) yang tidak setuju, yang berarti masih ada sebagian kecil yang meragukan keberadaan atau implementasi kebijakan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum, pemerintah desa telah memiliki dasar kebijakan tertulis untuk pengelolaan dan pengawasan keuangan, namun perlu ditingkatkan sosialisasi dan pemahaman agar seluruh aparatur desa mengetahui dan menerapkannya secara konsisten.

2. Saya melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa (Pernyataan 2)

Tabel 4.24. Hasil Kuesioner Pernyataan 2

Saya melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	5,3	5,3	5,3
	Netral	18	23,7	23,7	28,9
	Setuju	37	48,7	48,7	77,6
	Sangat Setuju	17	22,4	22,4	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparaturnya telah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Sebanyak 37 responden (48,7%) menyatakan setuju, dan 17 responden (22,4%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 71,1% responden memberikan penilaian positif terhadap praktik identifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan. Namun, terdapat 18 responden (23,7%) yang bersikap netral, yang mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya mungkin belum memahami sepenuhnya konsep manajemen risiko dalam keuangan desa. Selain itu, terdapat 4 responden (5,3%) yang tidak setuju, yang menunjukkan masih ada sebagian kecil yang belum menerapkan identifikasi risiko secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya identifikasi dan penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko lebih merata dan konsisten.

3. Tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dibagi secara jelas dan terdokumentasi (Pernyataan 3)

Tabel 4.25. Hasil Kuesioner Pernyataan 3

Tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dibagi secara jelas dan terdokumentasi.		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	13	17,1	17,1	18,4
	Setuju	38	50,0	50,0	68,4
	Sangat Setuju	24	31,6	31,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparatur desa menilai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sudah jelas dan terdokumentasi dengan baik. Sebanyak 38 responden (50,0%) menyatakan setuju, dan 24 responden (31,6%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 81,6% responden memberikan penilaian positif terhadap kejelasan dan pendokumentasian tugas serta wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat 13 responden (17,1%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian aparatur desa belum sepenuhnya memahami atau mengetahui detail pembagian tugas dan wewenang tersebut. Selain itu, hanya 1 responden (1,3%) yang tidak setuju, yang menunjukkan sebagian kecil masih meragukan kejelasan pembagian peran dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa pada umumnya sudah baik, meskipun masih diperlukan sosialisasi dan dokumentasi yang lebih merata agar seluruh aparatur desa memahami perannya masing-masing secara optimal.

4. Informasi keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait dan mudah dipahami (Pernyataan 4)

Tabel 4.26. Hasil Kuesioner Pernyataan 4

Informasi keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait dan mudah dipahami					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	13	17,1	17,1	17,1
	Setuju	34	44,7	44,7	61,8
	Sangat Setuju	29	38,2	38,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tanggapan responden, mayoritas aparaturnya menilai bahwa informasi keuangan desa telah disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Sebanyak 34 responden (44,7%) menyatakan setuju, dan 29 responden (38,2%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 82,9% responden memberikan penilaian positif terhadap transparansi dan keterbukaan informasi keuangan desa. Namun, terdapat 13 responden (17,1%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya merasakan atau mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi keuangan desa telah diterapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi keuangan desa sudah cukup baik, baik dari sisi keterbukaan penyampaian maupun kemudahan pemahaman bagi pihak terkait, meskipun perlu terus ditingkatkan agar seluruh informasi dapat diakses dan dipahami secara lebih merata oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pengawasan atas pelaksanaan keuangan desa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran (Pernyataan 5)

Tabel 4.27. Hasil Kuesioner Pernyataan 5

Pengawasan atas pelaksanaan keuangan desa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	17	22,4	22,4	23,7
	Setuju	37	48,7	48,7	72,4
	Sangat Setuju	21	27,6	27,6	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparat desa menilai bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa telah dilakukan secara berkala dan disertai tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Sebanyak 37 responden (48,7%) menyatakan setuju, dan 21 responden (27,6%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 76,3% responden memberikan penilaian positif terkait efektivitas pengawasan keuangan desa. Namun, terdapat 17 responden (22,4%) yang bersikap netral, yang mungkin menunjukkan bahwa sebagian aparat desa belum sepenuhnya memahami mekanisme pengawasan atau belum melihat secara langsung proses tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, hanya 1 responden (1,3%) yang tidak setuju, yang menunjukkan adanya sedikit keraguan terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan keuangan desa telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, dan dokumentasi hasil pengawasan agar seluruh aparat desa memahami prosesnya secara lebih menyeluruh.

6. Pemerintah desa segera mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam laporan keuangan (Pernyataan 6)

Tabel 4.28. Hasil Kuesioner Pernyataan 6

Pemerintah desa segera mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam laporan keuangan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	13	17,1	17,1	17,1
	Setuju	35	46,1	46,1	63,2
	Sangat Setuju	28	36,8	36,8	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya menilai pemerintah desa telah responsif dalam menangani penyimpangan laporan keuangan dengan segera melakukan tindakan perbaikan. Sebanyak 35 responden (46,1%) menyatakan setuju, dan 28 responden (36,8%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 82,9% responden memberikan penilaian positif terhadap respons pemerintah desa dalam menangani penyimpangan laporan keuangan. Namun, terdapat 13 responden (17,1%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya mengetahui proses tindak lanjut penyimpangan atau belum terlibat langsung dalam mekanisme perbaikannya. Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif terhadap penyimpangan laporan keuangan desa telah dilakukan secara cukup baik, meskipun perlu ditingkatkan transparansi dan komunikasi agar seluruh aparaturnya memahami langkah-langkah yang diambil secara lebih jelas.

4.5.5 Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

1. Laporan keuangan desa memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pembangunan desa (Pernyataan 1)

Tabel 4.29. Hasil Kuesioner Pernyataan 1

Laporan keuangan desa memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pembangunan desa					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	10	13,2	13,2	14,5
	Setuju	32	42,1	42,1	56,6
	Sangat Setuju	33	43,4	43,4	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparatur desa menilai bahwa laporan keuangan desa telah memberikan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Sebanyak 32 responden (42,1%) menyatakan setuju, dan 33 responden (43,4%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 85,5% responden memberikan penilaian positif terkait relevansi laporan keuangan desa terhadap perencanaan pembangunan. Sementara itu, terdapat 10 responden (13,2%) yang bersikap netral, yang dapat mengindikasikan bahwa sebagian aparatur desa belum sepenuhnya merasakan atau memahami keterkaitan langsung antara laporan keuangan dan keputusan pembangunan. Hanya 1 responden (1,3%) yang sangat tidak setuju, yang menunjukkan adanya sedikit keraguan terhadap fungsi laporan keuangan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. ‘Temuan ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan desa telah berperan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan desa secara lebih tepat sasaran dan transparan, meskipun diperlukan peningkatan pemahaman agar seluruh aparatur desa dapat memanfaatkan informasi tersebut secara maksimal.

- Informasi dalam laporan keuangan desa disajikan secara jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material (Pernyataan 2)

Tabel 4.30. Hasil Kuesioner Pernyataan 2

Informasi dalam laporan keuangan desa disajikan secara jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	2,6
	Netral	16	21,1	21,1	23,7
	Setuju	31	40,8	40,8	64,5
	Sangat Setuju	27	35,5	35,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya menilai laporan keuangan desa telah disajikan secara jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material. Sebanyak 31 responden (40,8%) menyatakan setuju, dan 27 responden (35,5%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 76,3% responden memberikan penilaian positif terkait keandalan dan kejujuran informasi dalam laporan keuangan desa. Namun, terdapat 16 responden (21,1%) yang bersikap netral, yang mungkin menunjukkan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya memahami prinsip penyajian laporan keuangan yang andal atau belum terlibat langsung dalam proses penyusunannya. Selain itu, masih ada 2 responden (2,6%) yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, yang mengindikasikan adanya sedikit keraguan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa secara umum telah memenuhi prinsip keandalan, kejujuran, dan netralitas, meskipun tetap diperlukan peningkatan pemahaman dan pengawasan untuk memastikan seluruh informasi terbebas dari kesalahan material.

3. Laporan keuangan desa disusun dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (Pernyataan 3)

Tabel 4.31. Hasil Kuesioner Pernyataan 3

Laporan keuangan desa disusun dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3,9	3,9	3,9
	Netral	8	10,5	10,5	14,5
	Setuju	35	46,1	46,1	60,5
	Sangat Setuju	30	39,5	39,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya menilai laporan keuangan desa telah disusun dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebanyak 35 responden (46,1%) menyatakan setuju, dan 30 responden (39,5%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 85,6% responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan pemahaman laporan keuangan desa. Namun, terdapat 8 responden (10,5%) yang bersikap netral, yang mungkin menunjukkan bahwa sebagian aparaturnya merasa masih ada ruang perbaikan dalam penyajian laporan agar lebih sederhana dan komunikatif. Selain itu, 3 responden (3,9%) tidak setuju, yang mengindikasikan masih adanya keraguan terkait keterbacaan laporan keuangan bagi masyarakat umum. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyusunan laporan keuangan desa secara umum telah memperhatikan aspek keterbacaan dan pemahaman publik, namun tetap perlu peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan bahasa agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami isi laporan dengan mudah.

4. Laporan keuangan desa dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten (Pernyataan 4)

Tabel 4.32. Hasil Kuesioner Pernyataan 4

Laporan keuangan desa dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,3	1,3	1,3
	Netral	14	18,4	18,4	19,7
	Setuju	34	44,7	44,7	64,5
	Sangat Setuju	27	35,5	35,5	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tanggapan responden, mayoritas aparaturnya menilai bahwa laporan keuangan desa telah disusun secara konsisten sehingga dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 34 responden (44,7%) menyatakan setuju, dan 27 responden (35,5%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 80,2% responden memberikan penilaian positif terkait konsistensi penyusunan laporan keuangan desa. Namun, terdapat 14 responden (18,4%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya memahami aspek perbandingan laporan antarperiode atau belum terlibat langsung dalam proses penyusunannya. Selain itu, hanya 1 responden (1,3%) yang tidak setuju, yang menunjukkan sedikit keraguan terhadap konsistensi laporan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan desa umumnya telah memenuhi prinsip konsistensi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis perbandingan kinerja keuangan antarperiode, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya keterbandingan laporan dari tahun ke tahun.

5. Laporan keuangan desa disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan (Pernyataan 5)

Tabel 4.33. Hasil Kuesioner Pernyataan 5

Laporan keuangan desa disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	6,6	6,6	6,6
	Setuju	45	59,2	59,2	65,8
	Sangat Setuju	26	34,2	34,2	100,0
	Total	76	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah, 2025

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa mayoritas aparaturnya menilai laporan keuangan desa telah disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebanyak 45 responden (59,2%) menyatakan setuju, dan 26 responden (34,2%) menyatakan sangat setuju, sehingga total 93,4% responden memberikan penilaian positif terkait ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa. Sementara itu, terdapat 5 responden (6,6%) yang bersikap netral, yang mungkin mengindikasikan bahwa sebagian aparaturnya belum sepenuhnya mengetahui jadwal penyampaian laporan atau belum terlibat langsung dalam proses pelaporannya. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju, yang menunjukkan bahwa ketepatan waktu sudah cukup baik dipahami dan diterapkan. Temuan ini menegaskan bahwa proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa telah berjalan efektif dan sesuai jadwal, mendukung prinsip akuntabilitas dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan desa.

4.6 Evaluasi Model Pengukuran

4.6.1 Uji Validitas

Kriteria penilaian uji validitas jika r hitung lebih besar dari r tabel maka pernyataan dinyatakan valid, namun jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka pernyataan dinyatakan tidak valid. Dalam uji validitas sumber daya manusia (X1),

implementasi akuntansi (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), sistem pengendalian internal (X4) dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Y).

Setiap uji statistik tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai acuan membuat kesimpulan. Begitu pula dengan uji validitas Product Pearson Correlation, dalam uji validitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan valid
2. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid.

Penulis menghubungkan setiap butir pertanyaan dengan data jumlah seluruh butir pernyataan setiap variabelnya dengan menggunakan Pearson's Product Moment, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34. Hasil Uji Validitas Sumber Daya Manusia

Butir Instrumen	r Tabel	r Hitung	Validitas
SDM.1	0,2257	0,599	Valid
SDM.2	0,2257	0,676	Valid
SDM.3	0,2257	0,686	Valid
SDM.4	0,2257	0,791	Valid
SDM.5	0,2257	0,692	Valid
SDM.6	0,2257	0,609	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan dari Tabel 4.34, menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel sumber daya manusia memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu r hitung $>$ 0,2257, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pernyataan variabel sumber daya manusia (X1) dinyatakan valid.

Tabel 4.35. Hasil Uji Validitas Implementasi Akuntansi

Butir Instrumen	r Tabel	r Hitung	Validitas
IA.1	0,2257	0,542	Valid
IA.2	0,2257	0,618	Valid
IA.3	0,2257	0,660	Valid
IA.4	0,2257	0,656	Valid
IA.5	0,2257	0,727	Valid
IA.6	0,2257	0,547	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.35, menunjukkan bahwa r tabel bernilai 0,2257, sedangkan seluruh r hitung lebih besar dari r tabel, atau r hitung $> 0,2257$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pernyataan pada variable implementasi akuntansi (X2) dinyatakan valid.

Tabel 4.36. Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi

Butir Instrumen	r Tabel	r Hitung	Validitas
TI.1	0,2257	0,452	Valid
TI.2	0,2257	0,608	Valid
TI.3	0,2257	0,706	Valid
TI.4	0,2257	0,488	Valid
TI.5	0,2257	0,433	Valid
TI.6	0,2257	0,438	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.36, menunjukkan bahwa r tabel bernilai 0,2257, sedangkan seluruh r hitung lebih besar dari r tabel, atau r hitung $> 0,2257$, sehingga

dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pernyataan pada variabel teknologi informasi (X3) dinyatakan valid.

Tabel 4.37. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Butir Instrumen	r Tabel	r Hitung	Validitas
SPI.1	0,2257	0,591	Valid
SPI.2	0,2257	0,726	Valid
SPI.3	0,2257	0,694	Valid
SPI.4	0,2257	0,678	Valid
SPI.5	0,2257	0,584	Valid
SPI.6	0,2257	0,574	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.37 menunjukkan bahwa r tabel bernilai 0,2257, sedangkan seluruh r hitung lebih besar dari r tabel, atau r hitung > 0,2257, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pernyataan pada variabel sistem pengendalian internal (X4) dinyatakan valid.

Tabel 4.38. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Butir Instrumen	r Tabel	r Hitung	Validitas
KLK.1	0,2257	0,477	Valid
KLK.2	0,2257	0,610	Valid
KLK.3	0,2257	0,683	Valid
KLK.4	0,2257	0,596	Valid
KLK.5	0,2257	0,556	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 4.38 merupakan pengujian validitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y), dan hasil uji validitas diatas ternyata koefisien korelasi semua

butir pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu 0,2257 maka dengan demikian semua item pernyataan tentang sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam sudah valid.

4.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan prosedur yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian, khususnya kuesioner yang berfungsi sebagai indikator pengukuran variabel. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel atau andal apabila respon yang diberikan oleh individu terhadap pernyataan yang sama menunjukkan hasil yang konsisten dan stabil, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Menurut (Ghozali, 2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana suatu kuesioner menghasilkan hasil yang konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang terhadap subjek yang sama. Senada dengan itu (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa reliabilitas instrumen menunjukkan derajat keajegan hasil pengukuran, yang berarti instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang stabil dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, reliabilitas mencakup dua aspek utama, yaitu stabilitas pengukuran dari waktu ke waktu dan konsistensi internal antarbutir pertanyaan dalam instrumen tersebut. Instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya karena minimnya pengaruh kesalahan pengukuran.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Uji ini dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha

$\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa item-item dalam suatu konstruk memiliki konsistensi internal yang baik (Saunders et al., 2019).

Tabel 4.39. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N Of Items
0,745	29

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.39 menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha dari variabel sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3), sistem pengendalian internal (X4) sebesar 0,745 dengan N of item sebesar 29 butir pernyataan, artinya Cronbach's Alpha $>$ dari nilai 0,70 atau $0,745 > 0,70$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan reliabel.

4.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi pada dasarnya adalah salah satu uji yang digunakan sebagai syarat statistik. Uji asumsi haruslah dipenuhi pada analisis regresi linier berganda serta tidak pada regresi linier sederhana. Melakukan uji asumsi sebelum melakukan uji hipotesis dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jika, hasil dari uji asumsi tidak sesuai dengan hipotesis maka akan timbul bermacam-macam reaksi. Oleh karena itu, melakukan uji asumsi terlebih dahulu adalah hal yang penting dalam penelitian kuantitatif.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3), sistem pengendalian internal (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah desa

di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi- asumsi berikut harus dipenuhi. Adapun tiga pengujian dalam asumsi klasik yaitu:

4.7.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit.

Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov smirov dengan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.40. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		2,08539362
Most Extreme Differences	Absolute		0,062
	Positive		0,039
	Negative		-0,062
Test Statistic			0,062
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		0,671
	99% Confidence	Lower Bound	0,659
	Interval	Upper Bound	0,683

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
 - e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.
-

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3), sistem pengendalian internal (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam berdistribusi normal.

4.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi berganda, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel atau sebaliknya. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antar variabel independent (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi (tolerance value) atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance $> 0,10$ dan batas $VIF < 10,00$, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasil perhitungan uji multikolinearitas menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.41. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	SDM	0,857	1,167
	IA	0,902	1,108
	TI	0,932	1,073
	SPI	0,915	1,093

a. Dependent Variable: KLKPD (Y)

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.41, seluruh variabel independen menunjukkan nilai Tolerance di atas 0,10, yaitu: Tolerance SDM (X1) sebesar 0,857, Tolerance IA (X2) sebesar 0,902, Tolerance TI (X3) sebesar 0,932, dan Tolerance SPI (X4) sebesar 0,915. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel juga berada di bawah 10, yaitu: VIF SDM (X1) sebesar 1,167, VIF IA (X2) sebesar 1,108, VIF TI (X3) sebesar 1,073, dan VIF SPI (X4) sebesar 1,093.

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Dengan kata lain, masing-masing variabel independen memberikan kontribusi yang relatif bebas dari pengaruh korelasi tinggi dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, model regresi tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.42. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,211	2,301		0,092	0,927
	SDM	0,061	0,048	0,161	1,275	0,206
	IA	-0,040	0,055	-0,089	-0,726	0,470
	TI	0,015	0,069	0,026	0,218	0,828
	SPI	0,024	0,053	0,054	0,446	0,657

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan table 4.42 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sumber daya manusia (X1) sebesar 0,206 lebih besar dari 0,05, nilai implementasi akuntansi (X2) sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05, nilai signifikan teknologi informasi (X3) sebesar 0,828 lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikan sistem pengendalian internal (X4) sebesar 0,657 juga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi infirmasi dan sistem pengendalian internal tidak terjadi gejala heteroskedasitas.

4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu Sumber Daya Manusia (X1), Implementasi Akuntansi (X2), Teknologi Informasi (X3), dan Sistem

Pengendalian Internal (X4) terhadap variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD) (Y).

Metode ini dipilih karena variabel dependen dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Dengan analisis ini, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, serta besarnya kontribusi yang diberikan.

Persamaan umum model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah desa)
- X1 : Sumber daya manusia
- X2 : Implementasi akuntansi
- X3 : Teknologi informasi
- X4 : Sistem pengendalian internal
- b0 : Konstanta (nilai Y saat seluruh X = 0)
- b1 – b4 : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e : Error/residual (kesalahan prediksi)

Berikut ini penulis sajikan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda yang memuat nilai koefisien, signifikansi, dan statistik pendukung lainnya:

Tabel 4.43. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0,211	2,301		0,092	0,927
	SDM	0,061	0,048	0,161	1,275	0,206
	IA	-0,040	0,055	-0,089	-0,726	0,470
	TI	0,015	0,069	0,026	0,218	0,828
	SPI	0,024	0,053	0,054	0,446	0,657

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.43 diatas dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = 0.211 + 0.061 X_1 + -0.040 X_2 + 0.015 X_3 + 0.024 X_4 + e$$

Keterangan Persamaan Y :

1. Jika variabel-variabel independent atau variabel sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3) dan sistem pengendalian internal (X4) sama 0 maka besaran kualitas laporan keuangan sama dengan nilai konstantanya sebesar 0,211
2. Jika variabel sumber daya manusia meningkat dengan asumsi variabel implementasi akuntansi, teknologi informasi dan variabel sistem pengendalian internal tetap, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.
3. Jika variabel implementasi akuntansi meningkat dengan asumsi variabel sumber daya manusia, teknologi informasi dan variabel sistem pengendalian internal tetap, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

4. Jika variable teknologi informasi meningkat dengan asumsi variabel sumber daya manusia, implementasi akuntansi dan variabel sistem pengendalian internal tetap, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.
5. Jika variable sistem pengendalian internal meningkat dengan asumsi variabel sumber daya manusia, implementasi akuntansi dan variabel teknologi informasi tetap, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

4.9 Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu antara sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi informasi serta sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Alat uji yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.

Terkait dengan penggunaan alat uji regresi linier berganda, ada 3 analisis yang peneliti gunakan yaitu:

4.9.1 Uji R

Koefisiensi determinasi (R^2) yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independent (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependent (Y), atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dimaknai nilai koefisien determinasi adalah uji F bernilai signifikan, yang berarti bahwa ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. sebaliknya jika hasil analisis dalam uji F tidak

signifikan, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan atau dipakai untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variable Y.

Berikut adalah hasil uji koefisiensi determinasi menggunakan SPSS:

Tabel 4.44. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,337 ^a	0,114	0,064	2,14333
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.44 output SPSS Model Summary diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau Adjusted R square adalah sebesar 0,064. Besarnya angka koefisien determinasi Adjusted R square adalah 0,064 atau sama dengan 6,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3) dan sistem pengendalian internal (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 6,4%. Sedangkan 93,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.9.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersamasama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis yang ada dalam uji F ini adalah ada pengaruh sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3) dan sistem pengendalian internal (X4) secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini adalah jika nilai sig < 0,05 maka

hipotesis didukung, jika nilai sig > 0,05 maka hipotesis tidak didukung. Sedangkan berdasarkan F hitung yaitu jika F hitung > F tabel maka hipotesis didukung, namun jika F hitung < F tabel maka hipotesis tidak didukung. Rumus mencari F tabel yaitu:

$$F \text{ tabel} = (a, df1, df2)$$

$$F \text{ tabel} = 0,05, df1 = 4 - 1 = 3, df2 = 76 - 4 = 72.$$

$$F \text{ tabel} = 2,732$$

Tabel 4.45. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41,782	4	10,446	2,274	0,070 ^b
	Residual	326,165	71	4,594		
	Total	367,947	75			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.45 output SPSS diatas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,070. karena nilai sig 0,070 > 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak didukung atau dengan kata lain variabel sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3) dan sistem pengendalian internal (X4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Sedangkan berdasarkan F hitung, output SPSS diatas menunjukkan bahwa diketahui nilai F hitung adalah sebesar 2,274, karena nilai F hitung 2,274 < F tabel 2,732, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak didukung atau variabel sumber daya manusia (X1), implementasi akuntansi (X2), teknologi informasi (X3) dan sistem pengendalian internal (X4) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

4.9.3 Uji T

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi multiple (berganda). uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi berganda uji t jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, namun jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Rumus untuk menentukan nilai t tabel sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (a/2; n-k-1 \text{ atau } df \text{ residual})$$

$$t \text{ tabel} = (0,05/2; 76 - 4 - 1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,025; 71).$$

$$t \text{ tabel} = 1,99394$$

$$t \text{ table} = 1,994$$

Tabel 4.46. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	0,211	2,301		0,092
	SDM	0,061	0,048	0,161	1,275
	IA	-0,040	0,055	-0,089	-0,726
	TI	0,015	0,069	0,026	0,218
	SPI	0,024	0,053	0,054	0,446

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.46, menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (X1) memiliki nilai signifikan sebesar $0,206 > 0,05$, maka dapat

disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama tidak didukung. Artinya tidak terdapat pengaruh sumber daya manusia (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). berdasarkan t hitung sumber daya manusia (X1) memiliki nilai $1,275 < 1,994$, maka disimpulkan bahwa H1 tidak didukung. Artinya tidak ada pengaruh sumber daya manusia (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dari Tabel 4.43, output SPSS diatas menunjukkan nilai sig variabel implementasi akuntansi (X2) sebesar $0,470 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H2 atau hipotesis kedua tidak didukung. Artinya, tidak ada pengaruh implementasi akuntansi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dan jika dilihat dari t hitung variabel implementasi akuntansi memiliki nilai sebesar $-0,726 < 1,994$, maka disimpulkan bahwa H2 tidak didukung. Artinya tidak ada pengaruh implementasi akuntansi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dari Tabel 4.43, output SPSS diatas menunjukkan nilai sig variabel teknologi informasi (X3) sebesar $0,828 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H3 atau hipotesis ketiga tidak didukung. Artinya, tidak ada pengaruh teknologi informasi (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dan jika dilihat dari t hitung variabel teknologi informasi memiliki nilai sebesar $0,218 < 1,994$, maka disimpulkan bahwa H3 tidak didukung. Artinya tidak ada pengaruh teknologi informasi (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dari Tabel 4.43, output SPSS diatas menunjukkan nilai sig variabel sistem pengendalian internal (X4) sebesar $0,657 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H4 atau hipotesis keempat tidak didukung. Artinya, tidak ada pengaruh sistem pengendalian internal (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), dan jika dilihat dari t hitung variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai sebesar $0,446 < 1,994$, maka disimpulkan bahwa H4 tidak didukung. Artinya tidak ada pengaruh sistem pengendalian internal (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

4.10 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan menunjukkan bahwa tidak satu pun dari empat variabel independen sumber daya manusia, implementasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Hal ini menjadi temuan menarik yang mengindikasikan adanya kompleksitas dalam pelaporan keuangan desa yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan teknis.

4.10.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,206 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya, secara statistik, kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Temuan ini bertolak belakang dengan teori Human Capital yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu penentu utama keberhasilan organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Becker (2009) dalam *Human Capital Theory* menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan individu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan akurasi kerja. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Yuliani and Kartika (2020), yang menyimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Namun, hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa meskipun aparatur desa memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, hal tersebut belum tentu diterjemahkan dalam pelaksanaan teknis yang efektif. Ketiadaan insentif, minimnya pengawasan, serta tidak adanya budaya

kerja yang menekankan pentingnya kualitas pelaporan bisa menjadi penyebab mengapa kompetensi SDM belum berimplikasi langsung pada kualitas laporan keuangan.

4.10.2 Pengaruh Implementasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil pengujian, implementasi akuntansi (X2) juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,469 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sistem atau standar akuntansi mungkin telah diterapkan, hal tersebut belum berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Padahal, dalam teori dan praktik akuntansi sektor publik, implementasi akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan faktor krusial dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan akuntabel (Zai et al., 2024). Ketidaksesuaian hasil ini dapat terjadi karena implementasi akuntansi di desa belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip SAP secara konsisten. Aparatur desa mungkin hanya sekadar mengikuti prosedur administratif tanpa memahami makna substantif dari pelaporan akuntansi. Temuan ini juga berbeda dengan studi sebelumnya oleh Khasanah dan Nurul (2020), yang menemukan bahwa implementasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh faktor kontekstual di lapangan, seperti keterbatasan pelatihan atau sumber daya pendukung dalam proses implementasi standar akuntansi secara menyeluruh.

4.10.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pemanfaatan teknologi informasi (X3) juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,640 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem aplikasi seperti Siskeudes atau perangkat lunak akuntansi lainnya belum cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di desa. Temuan ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Castells (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pelaporan. Dalam praktiknya, keberadaan teknologi saja tidak cukup tanpa adanya keterampilan pengguna (*user competency*), dukungan infrastruktur yang memadai, serta budaya kerja yang mengintegrasikan teknologi secara aktif dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan studi Soleman dan Latuconsina (2019) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Perbedaan hasil ini bisa disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar desa yang menjadi responden masih mengalami keterbatasan dalam literasi digital dan akses teknologi yang memadai.

4.10.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa

Variabel sistem pengendalian internal (X4) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,541 ($> 0,05$). Padahal, menurut teori COSO (2013), sistem pengendalian internal yang efektif merupakan instrumen penting dalam menjamin keandalan pelaporan keuangan serta mencegah terjadinya kesalahan dan

kecurangan. Ketiadaan pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada di tingkat desa belum berjalan optimal. Sistem pengendalian internal yang diterapkan cenderung bersifat formalitas administratif semata, tanpa evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitasnya. Selain itu, lemahnya fungsi audit internal dan keterbatasan kapasitas pengawasan dari lembaga seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat menjadi faktor penghambat. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Wahyuni dan Ramantha (2014) yang menemukan pengaruh signifikan antara Sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Artinya, dalam konteks Kecamatan Sultan Daulat, Sistem pengendalian internal belum menjadi mekanisme pengendalian yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Beberapa faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi Akuntansi, Pemanfaatan teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. Populasi dalam penelitian sebanyak 76 Perangkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dengan regresi linier berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aparatur desa memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, kompetensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan secara efektif. Faktor budaya organisasi, komitmen, dan minimnya pengawasan dapat menjadi penghambat optimalisasi kompetensi SDM.
2. Implementasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun standar akuntansi telah diperkenalkan, penerapannya masih bersifat formalitas administratif tanpa pemahaman substantif terhadap prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi atau sistem teknologi, seperti Siskeudes, belum diimbangi dengan literasi digital yang memadai, infrastruktur teknologi yang optimal, serta dukungan teknis yang berkelanjutan.
4. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Ketiadaan pengaruh ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan di tingkat desa belum berjalan optimal, cenderung bersifat administratif, dan tidak disertai evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pengendalian internal.

Secara keseluruhan, keempat variabel yang diteliti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Sultan Daulat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan desa tidak hanya bergantung pada faktor teknis seperti Sumber daya manusia, implementasi akuntansi, teknologi, atau Sistem pengendalian internal, tetapi juga pada faktor lain seperti komitmen kepemimpinan desa, budaya organisasi, pengawasan eksternal, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satu pun dari empat variabel independen (SDM, implementasi akuntansi, teknologi informasi, dan SPI) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini menjadi temuan menarik yang mengindikasikan adanya kompleksitas dalam pelaporan keuangan desa yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan teknis. Kemungkinan besar, faktor-faktor lain seperti budaya organisasi,

komitmen kepemimpinan desa, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan dari pihak eksternal (seperti inspektorat atau BPKP) memiliki peran penting yang belum tercakup dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan desa.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu melakukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan di bidang akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan literasi digital, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat diterapkan secara optimal. Dalam implementasi akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memahami substansi pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai serta pendampingan teknis, agar aplikasi seperti Siskeudes dapat digunakan secara optimal dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian internal di desa harus diperkuat tidak hanya melalui prosedur administratif, tetapi juga melalui evaluasi berkala, audit internal, serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian terbatas pada Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh desa di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda.

2. Jumlah responden dalam penelitian ini terbatas, yaitu hanya sebanyak 76 orang, sehingga temuan yang diperoleh berpotensi kurang menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh.
3. Pengukuran variabel menggunakan kuesioner berbasis persepsi responden, sehingga terdapat kemungkinan bias subjektivitas jawaban.
4. Model penelitian hanya memasukkan empat variabel independen, padahal terdapat faktor lain seperti komitmen kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengawasan eksternal yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan desa namun belum diteliti dalam penelitian ini.
5. Pendekatan penelitian bersifat *cross-sectional*, sehingga hanya memberikan gambaran pada satu periode waktu tertentu tanpa melihat dinamika perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

5.4 Saran Untuk penelitian Selanjutnya

1. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke wilayah lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.
2. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, komitmen kepemimpinan, pengawasan eksternal, atau partisipasi masyarakat yang mungkin lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dengan wawancara mendalam, sehingga dapat menggali faktor-faktor kontekstual yang tidak terukur melalui kuesioner.
4. Penelitian *longitudinal* juga dapat dilakukan untuk melihat perubahan kualitas laporan keuangan desa dari waktu ke waktu setelah adanya intervensi kebijakan atau pelatihan aparatur desa.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akurat. (2023). *Kejari Kota Subulussalam tahan oknum mantan Pj Kepala Desa Batu Napal*. KBBACEH.News.<https://kbbaceh.news/kejari-kota-subulussalam-tahan-oknum-mantan-pj-kepala-desa-batu-napal/>
- Arens, Alvin A. and Elder, Randal J. and Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (15th ed.). Pearson Education Limited.
- Becker, G. S. (2009). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9t69iICmrZ0C>
- Castells, M. (2011). *The Rise of the Network Society*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=FihjywtjTdUC>
- COSO. (2013). *Internal Control — Integrated Framework: Executive Summary*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
<https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dita, F., Niswatin, D., & -, U. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 54–65. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.7805>
- Donaldson, & Preston. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20, 65–91.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- Gaito, J. (1974). Fred N. Kerlinger Foundations of Behavioral Research (Second edition). New York: Holt, Rinehart, & Winston, 1973. Pp. xx + 741. \$13.95. *Psychometrika*, 39(2), 273–274. <https://doi.org/10.1007/S0033312300004713>
- Garicano, Luis and Heaton, P. (2010). Information Technology, Organization, and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments. *Journal of Labor Economics*, 28, 167–201.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, A. M. (2020). Analisis kelembagaan desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9698>

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 3, C). Salemba Empat.
- Halimah, S. N., Zuroida, A., & Djasuli, M. (2024). Literatur Review: Peran Teknologi Informasi dalam Pengembangan Akuntansi Modern. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(2), 20–29. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss2pp20-29>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Heryanto, Y. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:240566208>
- IASB. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. International Accounting Standards Board. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jonas, G. J., & Blanchet, J. (2000a). Assessing Quality of Financial Reporting. *Accounting Horizons*, 14(3), 353–363. <https://doi.org/10.2308/acch.2000.14.3.353>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- Khasanah, Nurul, R. dan I. M. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Desa pada Kualitas Laporan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1272–1284.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1–80.
- Laudon, Kenneth C and Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Rineka Cipta.
- Wardhana, M. D. A., Ramadhan, M. R. H. I dan Indawati, Y. (2023). Optimalisasi kewenangan

- Desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Dongko melalui legislasi Desa. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 01–10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154>
- Naufal, M. F. (2024). *Yuk, kenalan apa itu sistem pengendalian intern!!* Firman Romadhon Artikel Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, Dan Maluku. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papual Maluku/baca-artikel/16885/Yuk-Kenalan-Apa-itu-Sistem-Pengendalian-Intern.html#:~:text=Sistem Pengendalian Intern atau yang,efektif dan efisien%2C keandalan pelaporan>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nurhikmat, M., Azizi, E., dan Yulaikah, Y. (2022). Training on Preparation of Village Fund Financial Reports for Village Apparatus in Mangunreja Village. *PKM-P*, 6(2), 309. <https://doi.org/10.32832/jurma.v6i2.1530>
- Dewi, N. R., & Puspitasari, W. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan. *Journal of Economics and Business UBS*, 2(6), 3402–3411. <https://doi.org/10.52644/joeb.v2i6.673>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Permana, A. P., dan Suardana, I. W. (2017). Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(3), 105–120.
- Pilat, C. F. P. (2016). *Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada perusahaan kontraktor PT. Lumbung Berkat Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:151521152>
- Pulce, R. (2005). Optimizing your greatest capital—human resources. *Nurse Leader*, 3(6), 7. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2005.09.005>
- Resti, A. F. (2020). *Sistem pengendalian internal penerimaan kas terhadap penerimaan PJP2U Passenger Service Charge (PSC) Pada PT Angkasa Pura II (PERSERO) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:230683666>
- Yuliani, R., dan Kartika. D. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 101-115.
- Roza, W., Sari, Y. G., Putra, B. E., dan Putri. D. A. E. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran di dunia pendidikan. *Jurnal Binagogik*, 10(2), 89–98. <https://doi.org/10.61290/pgsd.v10i2.426>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Pearson Education Limited.

- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Sinurat, M., Putri, R. S. S., Sinaga, W., & Johannes, A. W. (2023). Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 89–105.
- Soleman, K., & Latuconsina, Y. M. (2019). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan desa dan pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Buru yang dimoderasi dengan peran pendamping profesional. *JURNAL MANEKSI*, 8(2), 254–260. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i2.408>
- Sreejesh, S., Mohapatra, S., & Anusree, M. R. (2014). *Business Research: A Value-Based Approach*. Springer.
- Suaryana, I. M. (2011). *Pengaruh pengendalian intern terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah*. Penerbit Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Revisi). Alfabeta.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Tranparansi dan akuntanilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>
- Syamsuddin. (2018). *Manajemen keuangan daerah*. Rajawali Pers.
- Tobamba, V. L., Alam, H. V., dan Monoarfa, V. (2023). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja karyawan pada kantor Samsat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(No. 1 (2023)), 86–92.
- Triuwono, E. (2019). Laporan keuangan desa : Sebuah tinjauan (Village Financial Statement: A Review). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3370324>
- United Nation Development Programme. (1997). Governance for suistainable human development. *United Nations Development Programme*, 1–39. <https://digitallibrary.un.org/record/492551?v=pdf>
- Wahyuni, N. W., dan Ramantha, I. G. N. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 10(1), 45–58.
- Welly, W. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1),

133. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5600>

- Yani., Fitri., and Wardani, S. (2021). Pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi*, 10, 117–126.
- Yuliana, S. S. S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 7(3), 1–63.
- Yuliani, R., Binti, R. E., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., dan Yasin, M. (2021). Digitalisasi laporan keuangan BUMDes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>
- Yusriadi, Y. (2021). *Village Financial Accountability Report Assessment Presentation based on Government Accounting Principles*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2f8jr>
- Zai, E., Zebua, S., Waruwu, N. A., dan Zebua, D. I. (2024). Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1787–1799. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>

LAMPIRAN



PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

Kuesioner Mengenai Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Saya Ardiansyah Putra, Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi saya dalam rangka menyelesaikan penelitian tesis saya.

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Untuk kepentingan itu, saya sangat menghargai dan berterima kasih, jika Bapak/Ibu/Sdr dapat meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan kuesioner ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr sangat berharga untuk membantu saya menyelesaikan studi S2 di Universitas Islam Indonesia.

Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan tidak akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan, mengingat kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Sdr akan kami jaga.

Atas bantuan dan kesediaan waktu Bapak/Ibu/Sdr saya mengucapkan terimakasih.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, Bapak/Ibu/Sdr dapat menghubungi saya melalui WA/Email +62-853-5849-9349 / 21919030@students.uii.ac.id.

Dengan Hormat,

Ardiansyah Putra
Program Pascasarjana Magister Akuntansi
Universitas Islam Indonesia

A. IDENTITAS RESPONDEN

Isilah identitas diri saudara dalam keadaan sebenarnya :

1. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
2. Pendidikan terakhir : ☐ SD/Sederajat
☐ SMP/Sederajat
☐ SMA/Sederajat
☐ S1
☐ Lain-lain ...
3. Lama menjabat : ☐ <1 Tahun
☐ >1 Tahun
☐ >2 Tahun
☐ >3 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN :

Silakan beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr terhadap pernyataan berikut, dengan skala penilaian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

B. VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

NO	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Laporan keuangan desa memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pembangunan desa.					
2	Informasi dalam laporan keuangan desa disajikan secara jujur, netral, dan bebas dari kesalahan material.					
3	Laporan keuangan desa disusun dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.					
4	Laporan keuangan desa dapat dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten.					
5	Laporan keuangan desa disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.					

C. VARIABEL SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NO	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas pengelolaan keuangan desa.					
2	Saya telah bekerja lebih dari satu tahun dalam posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.					
3	Saya memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan.					
4	Saya mampu menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
5	Saya mampu menjalankan tugas pelaporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab.					
6	Saya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan seperti Siskeudes.					

D. VARIABEL IMPLEMENTASI AKUNTANSI

NO	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya menyusun laporan keuangan desa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
2	Setiap transaksi keuangan desa saya lengkapi dengan bukti pendukung yang sah.					
3	Saya mencatat semua transaksi keuangan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.					
4	Administrasi keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan.					
5	Laporan keuangan disusun secara sistematis mulai dari jurnal, buku besar, hingga laporan akhir.					
6	Prosedur akuntansi keuangan desa diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.					

E. VARIABEL TEKNOLOGI INFORMASI

NO	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa.					
2	Desa kami memiliki perangkat komputer/laptop yang memadai untuk mengelola keuangan.					
3	Saya pernah mengikuti pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan.					
4	Sistem keuangan desa kami memudahkan integrasi dan akses data keuangan secara real-time.					
5	Teknologi informasi membantu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan keuangan.					
6	Sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa cukup aman dan andal.					

F. VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN INTERN

NO	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah desa memiliki kebijakan tertulis tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.					
2	Saya melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.					
3	Tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dibagi secara jelas dan terdokumentasi.					
4	Informasi keuangan desa disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait dan mudah dipahami.					
5	Pengawasan atas pelaksanaan keuangan desa dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.					
6	Pemerintah desa segera mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan dalam laporan keuangan.					

-----TERIMA KASIH-----